



REVIU RENSTRA

TAHUN 2021-2026

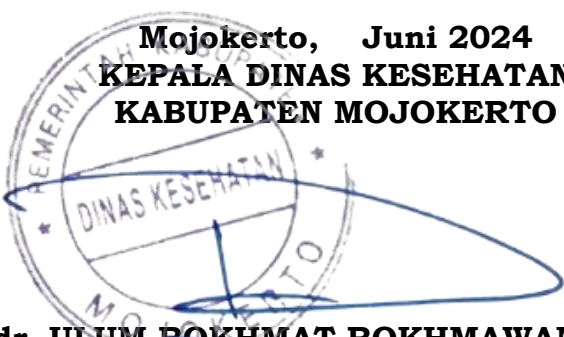
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Renstra yang sedang berjalan tidak lepas dari proses identifikasi kendala, tantangan, serta peluang perbaikan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program Kesehatan. Disamping itu, dengan adanya pertimbangan perubahan kebijakan dan dinamika sosial serta hasil evaluasi capaian program dan kegiatan yang telah dicapai maka perlu adanya reviu Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.

Reviu Renstra Tahun Dinas Kesehatan 2021-2026 mengacu pada berbagai regulasi, kebijakan, serta evaluasi kinerja yang telah dilakukan selama periode berjalan. Dasar utama pelaksanaan reviu Renstra antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan reviu Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan, memperkuat sistem Kesehatan, serta mewujudkan Masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Keberhasilan pelaksanaan reviu Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 sebagai acuan dan pedoman dalam merencanakan kegiatan selama lima tahun melibatkan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan semua pihak yang berkepentingan di bidang Kesehatan.


Mojokerto, Juni 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO

dr. ULUM ROKHMAT ROKHMAWAN, M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19741113 200604 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN	11
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	11
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan	19
2.2.1 Susunan Kepegawaian Dinas Kesehatan	19
2.2.2 SDM di UPT Puskesmas Kabupaten Mojokerto ...	20
2.2.3 Sarana dan Prasarana	21
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	44
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI DINAS KESEHATAN	46
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan	46
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Daerah Terpilih	49
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Provinsi	54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	58
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	58
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	61
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	75
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	80
BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	125
BAB VIII PENUTUP	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan:

- 1) Upaya peningkatan derajat kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, perbaikan gizi dan promosi kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, manajemen dan informasi kesehatan, 4) Upaya pengendalian penyakit, kualitas lingkungan dan penyehatan makanan dan minuman, dan 5) Pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral.

Untuk terselenggaranya hal tersebut, maka disusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2021 - 2026 yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 adalah dokumen perencanaan sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan. Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, mensinergikan perencanaan pembangunan kesehatan nasional, provinsi dan kabupaten melalui program-program kesehatan dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2021-2026 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
8. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Nomor Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
17. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6)
30. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1)
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
35. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto;
36. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang kesehatan.
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dan UPT- nya.
3. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT-nya.

4. Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra

1.2 provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD.

Maksud dan Tujuan

1.3 Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,

1.4 kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan

satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian (Analisis Gambaran Pelayanan OPD)

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan OPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana.

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi OPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB 7 INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB 8 PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KESEHATAN

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto mempunyai 28 UPT terdiri dari 27 Puskesmas, dan 1 Laboratorium Kesehatan Daerah. Susunan organisasi tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Bidang Kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas yang harus dikerjakan oleh Dinas Kesehatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sedangkan Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas Kesehatan;
- 2) Sekretariat;
 - (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan semua rencana kegiatan UPT di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Penyusunan Program;
- c. Sub Bagian Keuangan.

3) Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan meliputi kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- b. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan,

- pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga.
- 4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan meliputi surveilas dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan bahan kebijakan di bidang surveilas epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza);
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang surveilas epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik,

penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Napza.

- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang surveilas epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan napza;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang surveilas epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan napza;
- e. Pelaksanaan pemantauan di bidang surveilas epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan napza;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan, dan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:

- a. Seksi Surveilas dan Imunisasi;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

5) Bidang Pelayanan Kesehatan

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan

rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan kesehatan;

- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan serta jaminan kesehatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pelayanan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan serta jaminan kesehatan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang pelayanan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan serta jaminan kesehatan;
- e. Pelaksanaan pemantauan di bidang pelayanan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan serta jaminan kesehatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Kesehatan Primer;
- b. Kepala Seksi Kesehatan Rujukan;
- c. Kepala Seksi Kesehatan Tradisional.

6) Bidang Sumber Daya Kesehatan

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan meliputi kefarmasian, alat

kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. Perumusan bimbingan teknis dan supervise di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Kefarmasian;
- b. Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- c. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

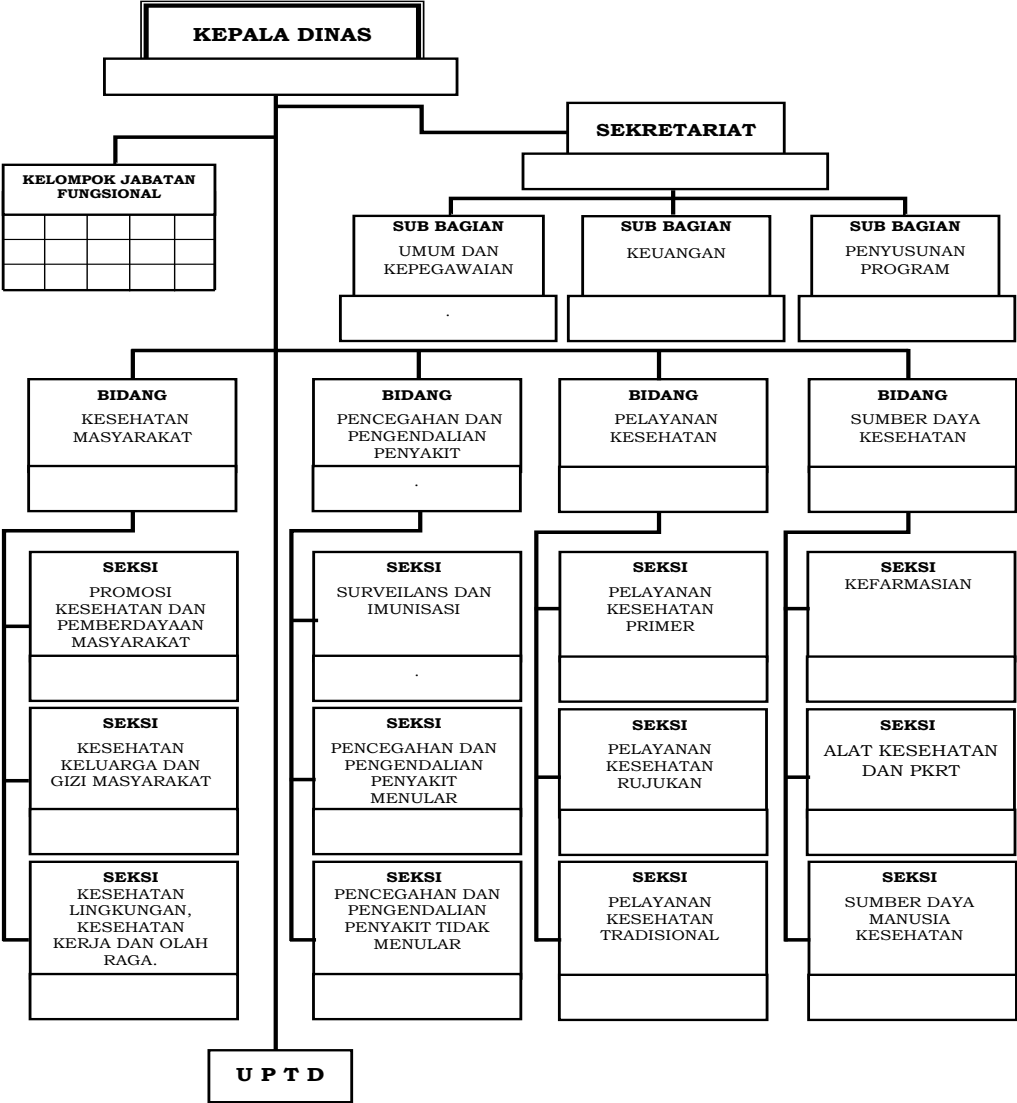
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

- (1) UPT adalah Unit Pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang tertentu;
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional;

- (4) UPT pada Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Puskesmas;
 - b. Laboratorium Kesehatan.
- (5) Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja;
- (6) Puskesmas, mempunyai fungsi:
 - a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b. Pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - c. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (8) Laboratorium Kesehatan adalah tempat khusus beserta peralatannya untuk melakukan pemeriksaan penunjang kesehatan medis dan kesehatan lingkungan;
- (9) Laboratorium Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang pelayanan laboratorium kesehatan;
- (10) Laboratorium Kesehatan, mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja laboratorium kesehatan;
 - b. Pelaksanaan pengambilan, pemeriksaan dan pengiriman sampel klinis, kimia dan air;
 - c. Pelaksanaan analisa hasil pemeriksaan laboratorium;

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJKERTO



2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

2.2.1 Susunan Kepegawaian Dinas Kesehatan

Kepegawaian (Sumber Daya Manusia) merupakan faktor penting dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Jumlah SDM di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dan UPTnya sampai tanggal 31 Maret pada tahun 2021 sebanyak 98 orang, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	L	P	Jumlah
1	Struktural Eselon II	1	0	1
2	Struktural Eselon III	4	1	5
3	Struktural Eselon IV	5	7	12
4	Fungsional:			
	- Sanitarian Muda	0	0	0
	- Nutrisisionis Muda	0	0	0
	- Penyuluh Kesehatan Muda	0	0	0
	- Epidemiologi Muda	0	0	0
	- Administrator Kesehatan Muda	0	0	0
	- Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	0	0	0
5	Staf	38	42	80
	Jumlah	48	50	98

Tabel 2.2
Jumlah SDM Dinkes Kabupaten Mojokerto
berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1	S2 Magister Kesehatan	4	1	5
	S2 Magister Non Kesehatan	0	0	0
2	S1 Kesehatan	4	14	18
	S1 Non Kesehatan	11	6	17
3	D IV Kebidanan	0	2	2
	D IV Analis	1	0	1
4	DIII Kebidanan	0	6	6
	DIII Keperawatan	5	5	10
	DIII Kesling	1	2	3
	DIII Analis	1	2	3
	DIII Kestrad	0	1	1

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
5	DII Kebidanan	0	1	1
6	DI Kebidanan	0	2	2
7	SLTA	15	8	23
8	SLTP	6	0	6
7	SD	0	0	0
	Jumlah	48	50	98

2.2.2 SDM di UPT Puskesmas Kabupaten Mojokerto

Jumlah SDM UPT Puskesmas di Kabupaten Mojokerto pada 31 Maret 2021 menurut data kepegawaian Dinkes Kabupaten Mojokerto sebanyak 1.382 orang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah SDM UPT Puskesmas di Kabupaten Mojokerto
berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1	S2 Magister Kesehatan	7	13	20
	S2 Magister Non Kesehatan	1	0	1
2	S1 Kesehatan	61	134	195
	S1 Non Kesehatan	14	22	36
3	D IV Kebidanan	0	90	90
	D IV Keperawatan	1	1	2
	D IV Keperawatan Kesehatan Gigi	0	2	2
	D IV Analis	0	1	1
	D IV Kesehatan Lingkungan	0	1	1
4	D III Akuntansi	1	2	3
	D III Kebidanan	0	310	310
	D III Keperawatan	87	266	353
	D III Keperawatan Gigi	7	9	16
	D III Kesling	4	17	21
	D III Gizi	1	23	24
	D III Analis	7	23	30
	D III Farmasi	1	19	20
	D III Kestrad	0	0	0
	D III Perkam Medik dan Informasi Kesehatan (PMIK)	0	1	1
	D III Ahli Teknologi Laboratorium Medik	2	5	7
	D III Teknik Informatika	2	0	2

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
	D III Manajemen Informatika	0	1	1
	D III Apoteker	0	1	1
	D III Administrasi	0	1	1
5	DII Kebidanan	0	3	3
6	DI Kebidanan	0	16	16
	DI Non Kesehatan	0	3	3
7	SLTA	92	109	201
8	SLTP	6	6	12
9	SD	1	7	8
	Jumlah	295	1086	1381

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel.2.4
Sarana dan Prasarana Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	27
2	Puskesmas Perawatan	17
3	Puskesmas Non Perawatan	10
3	Puskesmas Pembantu	55
4	Ponkesdes	211
5	Posyandu	1277
6	RSUD	2
7	RS. Swasta	8
8	Labkesda	1
9	Puskesmas Keliling (Pusling)	27

Sumber : Data Kondisi Sarana, Prasarana tahun 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan sasaran/target Renstra di periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terealisasi sesuai dengan target yang diinginkan oleh pemerintah. Hal ini bisa terlihat di dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2016-2020 (TC-23)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK 2021	Target IKK 2021	Target Indikator Lainnya (SDG's)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	AKI per 100.000 KH	149/100.000 KH (25 ibu)			179 (30 ibu)	170 (29 ibu)	167 (28 ibu)	161 (27 ibu)	155 (26 ibu)	140,86	173,82	113,00	89,60	115,00	0,78	1,02	0,68	0,55	0,74
2	AKB per 1.000 KH	11/1.000 KH (100 bayi)			11,5	11,4	11,3	11,2	11,1	12,70	8,81	8,60	6,82	4,60	1,10	0,77	0,76	0,61	0,41
3	Persentase Balita Gizi Buruk yang ditangani	170 balita			0,34% (238 balita)	0,31% (217 balita)	0,28 (200 balita)	0,25 (190 balita)	0,23 (180 balita)	0,34% (238 balita)	0,31 %(217 balita)	0,32 %(224 balita)	0,29 %(202 balita)	0,16% (112 balita)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Persentase Kejadian Luar Biasa	1,9% (6 desa)			5,3%(16 desa)	4,6% (14 desa)	3,9% (12 desa)	3,3% (10 desa)	1,9% (6 desa)	5,3%(16 desa)	4,6% (14 desa)	7,2% (22 desa)	0,32% (1 desa)	72% (219 desa)	1,00	1,00	1,83	0,10	36,50
5	Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi	100%			13%	25%	37%	44%	68%	13%	25%	37%	44%	45%	1,00	1,00	1,00	1,00	0,66
6	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%			18.643	18.559	18.475	18.394	18.394	15.854	16.468	16.320	16.565	16.490	0,85	0,89	0,88	0,90	0,90
7	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%			17.795	17.635	17.715	17.558	17.558	16.361	16.694	16.703	16.723	16.545	0,92	0,95	0,94	0,95	0,94
8	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%			16.948	16.872	16.985	16.722	16.795	16.233	16.699	16.700	16.722	16.612	0,96	0,99	0,98	1,00	0,99
9	Pelayanan kesehatan anak balita	100%			67.553	84.155	83.655	66.298	66.670	57.369	73.936	72.817	55.739	45.404	0,85	0,88	0,87	0,84	0,68
10	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Kelas 1 dan Kelas 7	100%			17.035	40.767	48.355	31.623	38.854	14.159	39.388	48.355	31.623	38.854	0,83	0,97	1,00	1,00	1,00
11	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (Usia 15-59 tahun)	100%				728.675	733.468	737.828	741.974		48.742	34.646	306.450	106.061		0,07	0,05	0,42	0,14

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK 2021	Target IKK 2021	Target Indikator Lainnya (SDG's)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
12	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%			112.542	108.794	118.503	127.743	179.307	71.388	75.741	62.726	90.534	151.994	751,45	0,01	660,27	952,99	1599,94
13	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%			783.157	216.572	214.787	217.273	224.143	34.958	43.064	30.017	76.024	99.852	0,04	0,20	0,14	0,35	0,45
14	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%				75.866	76.502	77.120	60.390		16.113	16.113	31.062	44.600		0,21	0,21	0,40	0,74
15	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%				43	89	2.011	1.879		43	89	1.112	1.879		1,00	1,00	0,55	1,00
16	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%			3.129	692	3.218	1.887	2.513	502	692	1.430	1.517	1.043	0,16	1,00	0,44	0,80	0,42
17	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%				576	12.310	32.591	32.591		576	12.310	13.921	12.002	1,06	1,05	1,08	0,45	1,07
18	Rumah Tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	66,86%			61,86	62,86	63,86	64, 86	65,86	61,86	52,92	75,04	75,50	76	1,00	0,84	1,18	1,17	1,15
19	Rumah Tangga / KK yang Menggunakan Jamban Sehat				75,48%	80,40%	81,40%	82,40%	83,40%	75,50	80,45	79,47	88,10	91,80	0,39	0,58	0,79	0,99	3,92
20	Persentase Cakupan Puskesmas Standar				74% (20 puskesmas)	85% (23 puskesmas)	88% (24 puskesmas)	92% (25 puskesmas)	96% (26 puskesmas)	74,00	85,00	88,00	93,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,01	1,04

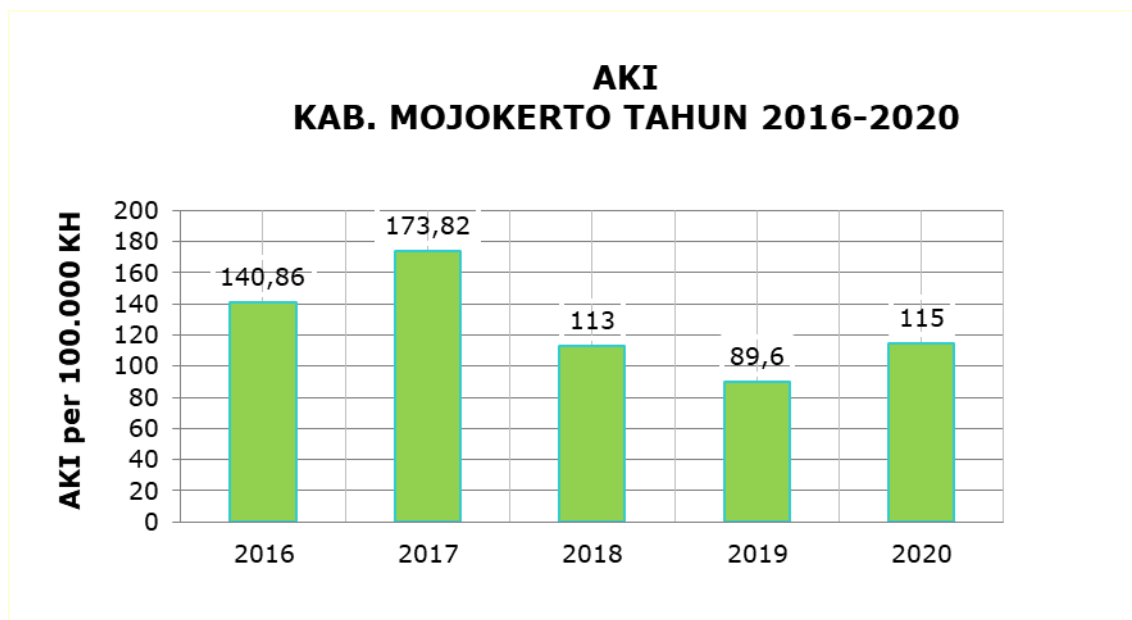
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK 2021	Target IKK 2021	Target Indikator Lainnya (SDG's)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
22	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)				95%	95%	95%	95%	95%	70,07	81,25	89,14	82,20	82,90	0,74	0,85	0,94	0,87	1,18
23	Akreditasi Puskesmas dan RSUD Strata Madya				1,00	10,00	21,00	27,00	27,00	1,00	10,00	21,00	27,00	27,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
24	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas				B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien				B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
27	Persentase Cakupan Penemuan & Penanganan Penyakit DBD				100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
										434,00	221,00	404,00	267,00	97,00					
28	Persentase Tercukupinya Pelayanan Masyarakat Miskin				96,5	97	97,5	98	98,5	88,00	90,28	91,48	99,90		0,91	0,93	0,94	1,02	0,00
29	Persentase Cakupan Kunjungan Bayi				96,72%	97,00%	97,28%	97,56%	97,84%	93,46%	98,97%	98,32%	99,80%	88,60%	0,97	1,02	1,01	1,02	0,91

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK 2021	Target IKK 2021	Target Indikator Lainnya (SDG's)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
30	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas																		
	R Jalan				54,43	51,51	122,2	124,06	178,3	51,51	122,12	124,06	178,30	88,37	0,95	2,37	1,02	1,44	0,50
	R Inap				5,31	5,7	6,27	7,07	12,4	5,71	6,27	7,07	12,40	1,54	1,08	1,10	1,13	1,75	0,12
31	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin				15,79	16,66	4,52	5,70	5,70	15,79	16,66	4,52	5,70	5,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Berikut gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2016-2020 untuk Indikator Kinerja Utama dan Standar Pelayanan Minimal:

1. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian perempuan pada saat hamil, persalinan atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yang kematiannya disebabkan karena kehamilan dan bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain. Angka kematian ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup. Berikut gambaran Angka Kematian Ibu dari Tahun 2016-2020:



Gambar 2.1 Jumlah Kematian Ibu Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 -2020

Upaya yang selama ini telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk menurunkan AKI dan AKB:

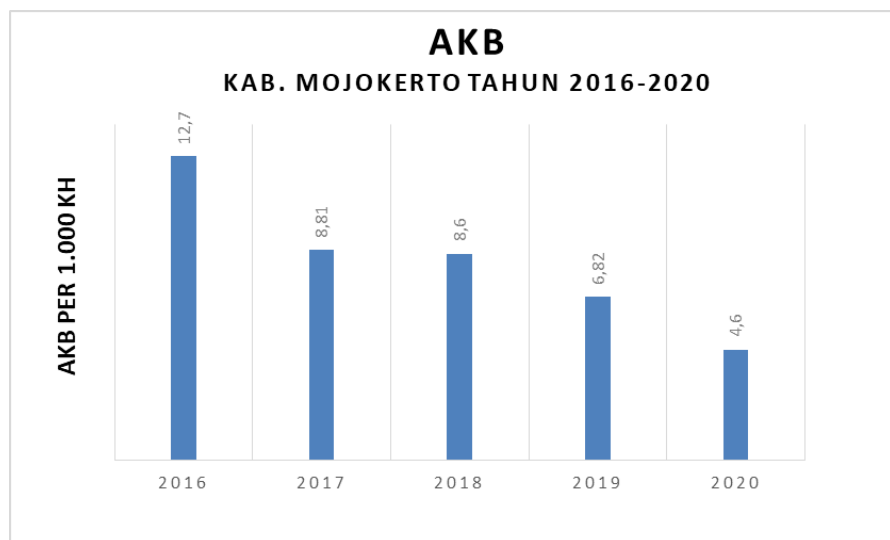
1. Pendewasaan usia pernikahan dan Penyuluhan kesehatan reproduksi untuk siswa SMP dan SMA
2. Meningkatkan cakupan KB Aktif
3. Pelayanan Antenatal Care Terpadu (pelayanan sebelum melahirkan) yang berkualitas
4. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) pada ibu hamil untuk KB pasca salin
5. Pemberdayaan masyarakat melalui P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) Desa Siaga

6. Pemberian stempel tanda merah pada ibu hamil resiko tinggi dengan skor Poedji Rochyati ≥ 10
7. Peningkatan pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita
8. Pengkajian kasus kematian ibu dan bayi oleh Tim Pengkaji (Dokter Spesialis Terkait)
9. Persalinan 4 tangan
10. Pendampingan Bumil oleh kakek nenek melalui Program Kakek Nenek Asuh
11. Penggalakkan kelas Bapak

2. Angka Kematian Bayi

Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0 – 11 bulan. Angka kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab dari kematian bayi di Kabupaten Mojokerto diakibatkan oleh BBLR (berat bayi lahir rendah), asfiksia, kongenital, sepsis, kelainan bawaan dan sebab lain seperti aspirasi ASI, kejang demam. Pada tahun 2020 terdapat 15.253 kelahiran. Angka kematian bayi adalah 4,6 per 1.000 kelahiran hidup.

Berbagai upaya untuk menurunkan angka kematian bayi telah dilakukan, antara lain dengan diadakannya kelas ibu hamil, pertemuan bidan dengan narasumber yang berkompeten untuk meningkatkan pengetahuan bidan, pelatihan fasilitator kelas Ibu Balita, serta adanya kegiatan pendampingan untuk ibu hamil resiko tinggi (risti). Berikut gambaran Angka Kematian Bayi dari tahun 2016-2020 yang memperlihatkan penurunan jumlah kematian bayi:



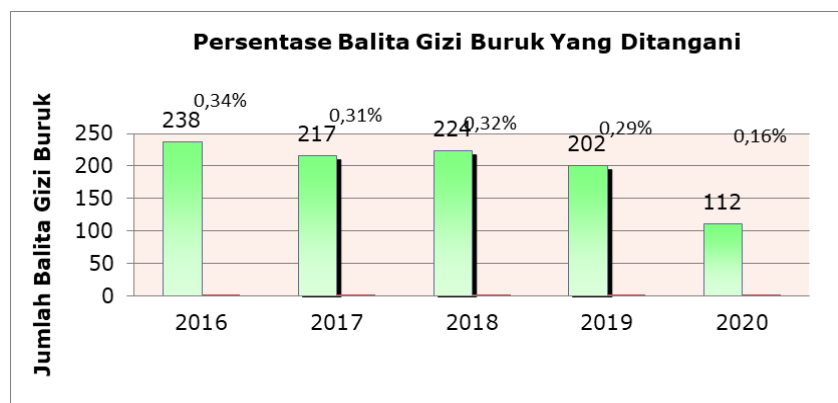
Gambar 5.2 Jumlah Kematian Bayi Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 -2020

3. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase Balita Gizi Buruk pada tahun 2020, realisasi capaian adalah 0,14 % (112 balita), artinya lebih rendah dari target yang ditetapkan tahun 2020 yaitu 0,23% (180 balita). Bila dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 juga telah mengalami penurunan jumlah balita gizi buruk. Pada tahun 2018 capaian balita gizi buruknya adalah 0,32% (224 balita) dan tahun 2019 adalah 0,29% (197 balita). Realisasi jumlah balita gizi buruk tahun 2020 yang berjumlah 112 balita turun dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan:

- Upaya penurunan telah dilaksanakan mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
- Adanya kerjasama antara lintas program dan lintas sektor mendukung upaya penurunan gizi buruk
- Adanya upaya peningkatan kapasitas petugas gizi yang ada di puskesmas
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan gizi keluarga dan gizi masyarakat

Berikut gambaran kondisi Balita Gizi Buruk dari Tahun 2016-2020 :



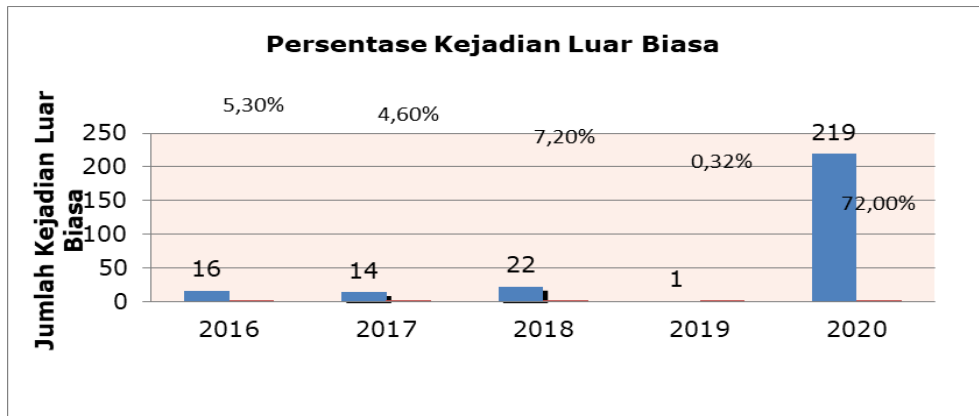
Gambar 2.3 Jumlah Balita Gizi Buruk Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 -2020

4. Persentase Kejadian Luar Biasa

Persentase Kasus KLB yang ditangani yaitu jumlah desa yang mengalami kejadian luar biasa. Pada tahun 2020 ditargetkan 8 desa yang mengalami KLB, namun dikarenakan ada pandemik Covid-19, dari 304 desa yang terdapat penderita Covid-19 ada 219 desa melebihi target 2020 yang harusnya hanya 8 desa. Hal ini memang sulit bagi Dinas kesehatan Kabupaten Mojokerto untuk mengendalikan penyebaran pandemi dengan tingkat penularan yang

tinggi dan diperlukan kerjasama dengan semua pihak, baik pemerintahan maupun masyarakat.

Berikut gambaran Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) tahun 2016-2020:



Gambar 2.4 Jumlah Kejadian Luar Biasa Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 -2020

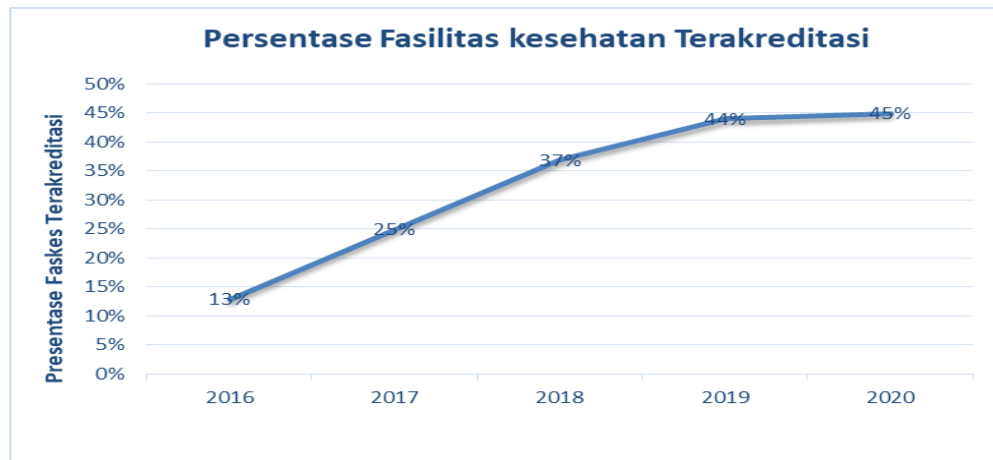
Yang dapat dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto adalah mencegah agar tidak meluas pandemi Covid-19 ke desa lainnya yang belum ada kasus covid-19. Upaya yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2020-Desember 2020 antara lain:

- Sosialisasi tentang pandemi covid-19, bagaimana penularan dan bagaimana upaya mencegah dan menanggulangi apabila masyarakat ada yang tertular.
- Menyiapkan logistik untuk penanganan covid-19, antara Alat Pelindung Diri, desinfektan, hand sanitasi, bahan medis habis pakai (reagen), dan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan covid-19.
- Menyiapkan Rumah Sakit rujukan dan perawatan serta rumah isolasi (puskesmas), yaitu Puskesmas Gondang, Dawarblandong, Kupang, Jatirejo, Gayaman, dan Puri.

5. Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi

Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi, pada tahun 2020 ditargetkan jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi adalah 68% (10 RS, 27 Pusk, 20 Klinik), namun capaian kinerjanya hanya 45% (10 RS, 27 Puskesmas, dan 1 klinik). Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 ada pandemi covid-19, maka kegiatan akreditasi baik re akreditasi RS, Puskesmas dan akreditasi klinik ditiadakan. Sehingga untuk pencapaian realisasi persentase fasilitas kesehatan

terakreditasi tidak bisa mencapai sesuai target yang ditetapkan. Berikut gambaran fasilitas kesehatan yang telah diakreditasi tahun 2016-2020:



Gambar 2.5 Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 -2020

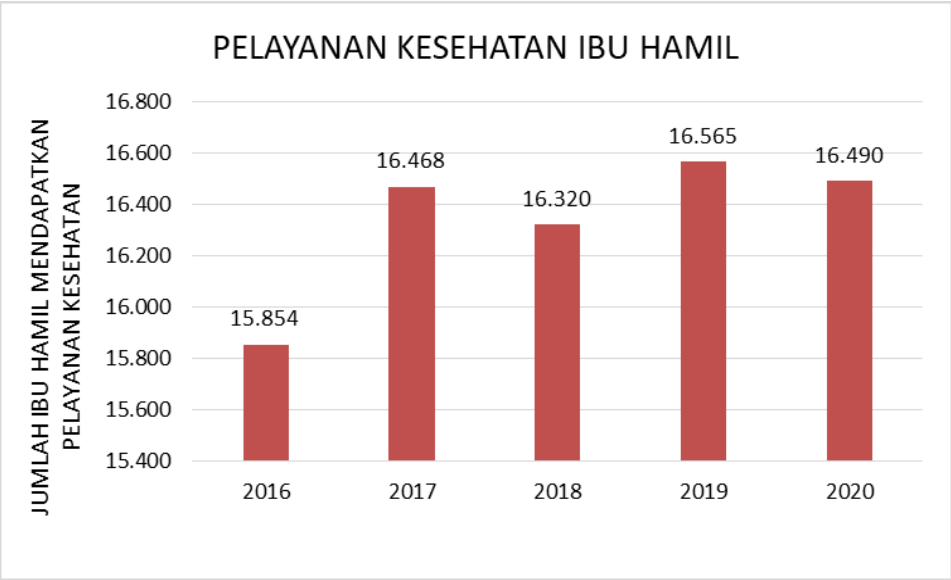
Berikut gambaran capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dari Tahun 2016-2020:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil diberikan kepada ibu hamil yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Proses ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil diupayakan agar memenuhi standar kualitas, yaitu:

- a. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
- b. Pengukuran tekanan darah.
- c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA).
- d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
- e. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toxoid sesuai status imunisasi.
- f. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan.
- g. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).
- h. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk KB pasca persalinan).
- i. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya).
- j. Tatalaksana kasus sesuai indikasi.

Berikut gambaran pelayanan Ibu Hamil dari Tahun 2016-2020:

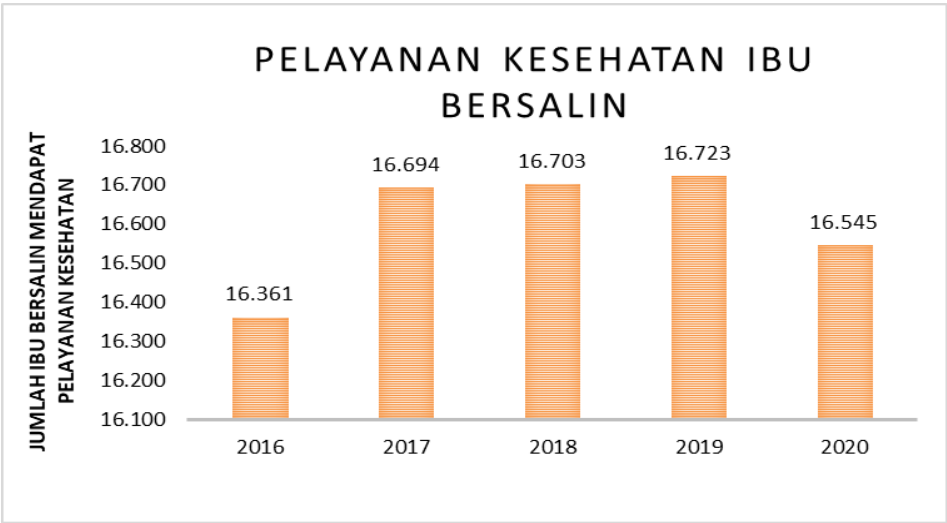


Gambar 2.6 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2016 -2020

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pertolongan persalinan juga merupakan salah satu kualitas pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dimana proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Hal ini dapat menggambarkan bahwa masyarakat paham tentang pentingnya keamanan dalam pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

Jumlah ibu bersalin sebesar 17.488 orang, yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Mojokerto tahun 2020 sebesar 16.550 (94,6%). Jumlah ibu yang bersalin di fasilitas kesehatan di Kabupaten Mojokerto tahun 2020 sebesar 16.545 (94,6%). Berikut gambaran pelayanan ibu bersalin dari tahun 2016-2020:



Gambar 2.7 Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan Tahun 2016 -2020

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Berikut gambaran pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2016-2020 yang menunjukkan peningkatan di tahun 2016-2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2020, ada kendala dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, yaitu adanya situasi pandemi yang menurunkan jumlah kunjungan ibu dan bayi di fasilitas kesehatan.



Gambar 2.8 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2016 -2020

4. Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Hal yang sama juga terjadi pada pelayanan kesehatan anak balita. Dimana capaian tahun 2020 juga mengalami penurunan karena adanya pandemic, adanya pengurangan kontak dengan masyarakat. Namun demikian kegiatan pelayanan diupayakan tetap berjalan dengan mengadakan janji temu dengan masyarakat, kader dan petugas kesehatan



Gambar 2.9 Pelayanan Kesehatan Anak Balita Tahun 2016 -2020

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Kelas 1 dan Kelas 7

Pada pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7, dilaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan untuk siswa yang masuk sekolah pada tahun ajaran baru. Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan adalah dengan tetap melaksanakan skrining kesehatan dengan google form. Sedangkan sekolah yang melaksanakan tatap muka bisa dilaksanakan kegiatan untuk pemberian tablet Fe dan skrining 100 persen dengan persetujuan Kepala Sekolah. Selain itu, skrining kesehatan juga dilaksanakan secara bertahap.



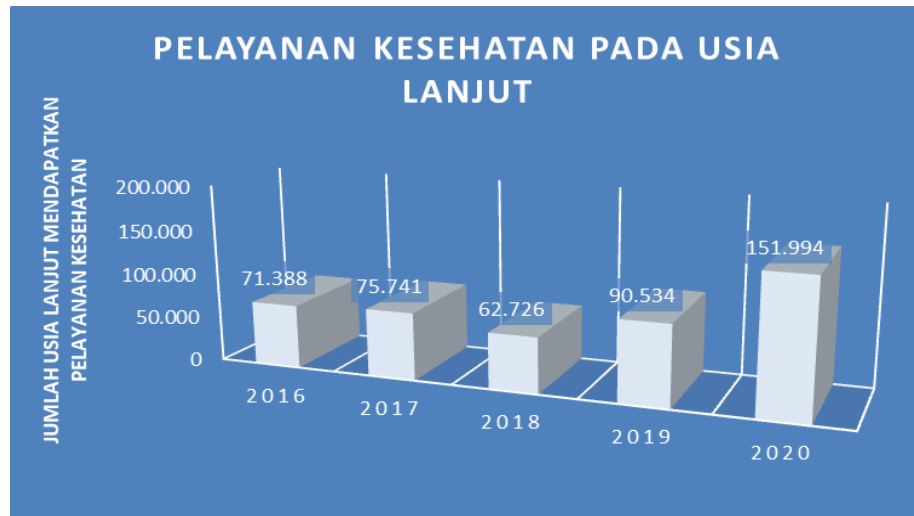
Gambar 2.10 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Kelas 1 dan kelas 7 Tahun 2016 -2020

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan usia lanjut yaitu pelayanan penduduk usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan, baik di puskesmas maupun di posyandu/ kelompok usia lanjut. Dalam pelayanan kesehatan usia lanjut di Kab. Mojokerto berpedoman pada SPM dan PKP dengan target 100%. Pelayanan kesehatan untuk lanjut usia dimulai usia 60 tahun ke atas dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Kegiatan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar antara lain yaitu:

1. Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut
2. Pengukuran tekanan darah
3. Pemeriksaan gula darah

4. Pemeriksaan gangguan mental
5. Pemeriksaan gangguan kognitif
6. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut (format P3G)
7. Anamnesa perilaku berisiko



Gambar 2.11 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Tahun 2016 -2020

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan lansia antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi (Penguatan Promosi Kesehatan melalui pendekatan perubahan gaya hidup).
2. Meningkatkan akses masyarakat lansia untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas (Penguatan sistem kesehatan untuk mendukung “Active and Healthy Ageing”).
3. Menjalin kemitraan.
4. Memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat dan mandiri di usia lanjut.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam upaya kesehatan usia lanjut.
6. Mengupayakan anggaran dari pemerintah, swasta dan masyarakat
7. Kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk pengembangan program.

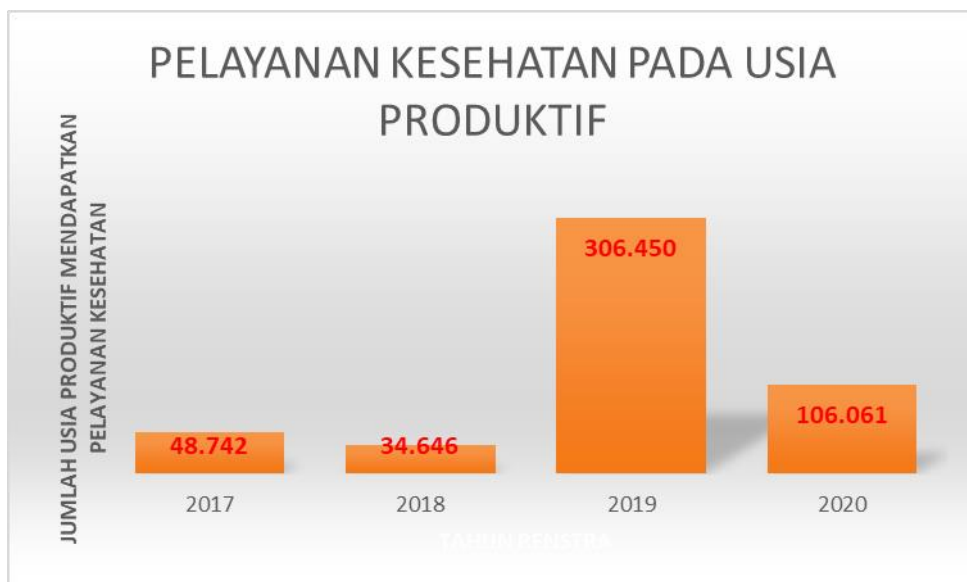
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Usia 15-59 tahun)

Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun sesuai standar adalah pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun diberikan sesuai kewenangannya oleh dokter, bidan, perawat, nutrisionis/tenaga

gizi, petugas pelaksana posbindu PTM terlatih. Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali. pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun meliputi:

1. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut.
2. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer.
3. Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah.
4. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.
5. Pemeriksaan ketajaman penglihatan.
6. Pemeriksaan ketajaman pendengaran.
7. Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30-59.

Berikut gambaran pelayanan kesehatan usia produktif:



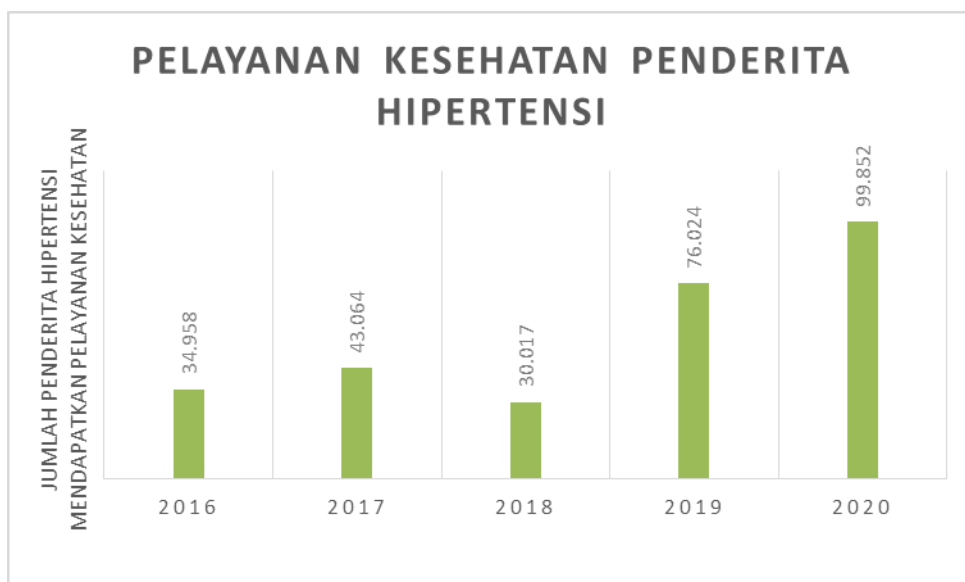
Gambar 2.12 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2016 - 2020

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Hipertensi/tekanan darah tinggi adalah adalah Peningkatan tekanan darah yaitu keadaan dimana tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg (*Joint National Committee on Prevention Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure*

VII/JNC-VII, 2003). Peningkatan ini menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras dari biasanya untuk mengedarkan darah melalui pembuluh darah. Tekanan darah melibatkan dua pengukuran, sistolik dan diastolik, tergantung apakah otot jantung berkontraksi (sistole) atau berelaksasi di antara denyut (diastole).

Pengukuran tekanan darah adalah Penduduk yang berusia ≥ 15 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah minimal satu tahun sekali di suatu wilayah. Pengukuran dapat dilakukan di dalam unit pelayanan kesehatan primer, pemerintah maupun swasta, di dalam maupun di luar gedung.

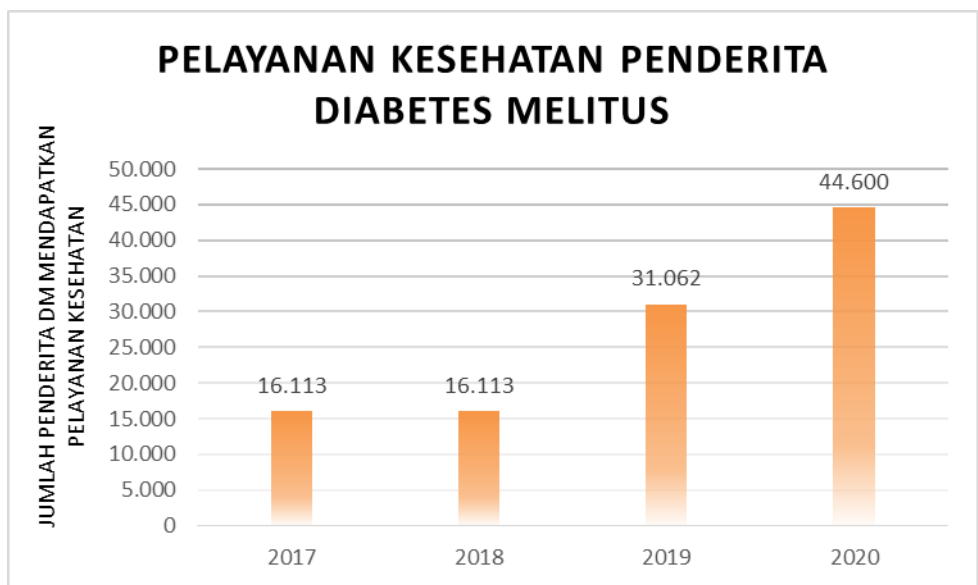


Gambar 2.13 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2016 - 2020

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Diabetes adalah suatu penyakit dimana tubuh tidak dapat menghasilkan insulin (hormon pengatur gula darah) atau insulin yang dihasilkan tidak mencukupi atau insulin tidak bekerja dengan baik. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi: 1) Pengukuran gula darah; 2) Edukasi 3) Terapi farmakologi.

Perhitungan capaian pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yaitu Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikalikan dengan 100%.

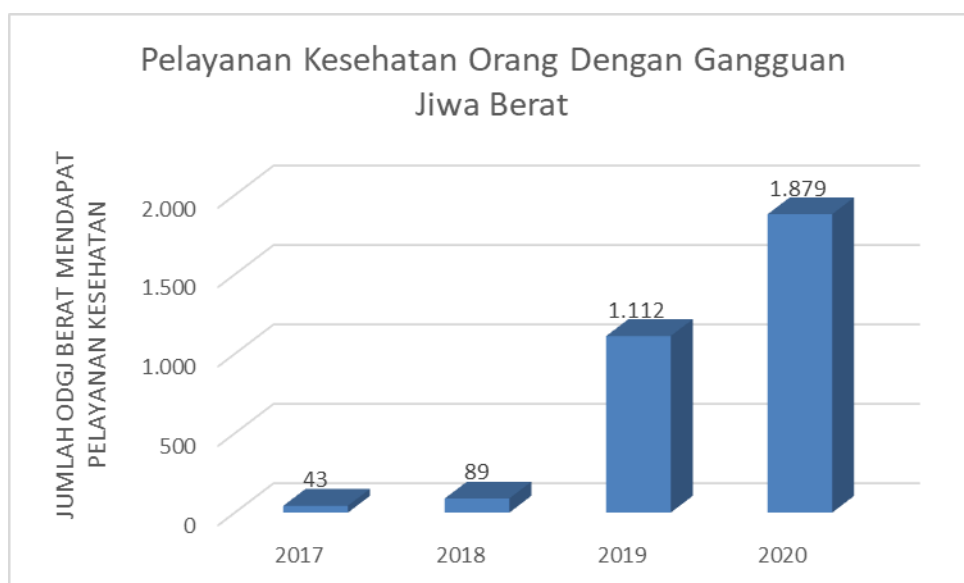


Gambar 2.14 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2016 - 2020

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Kesehatan Jiwa menurut Undang-undang tentang kesehatan jiwa nomor 18 tahun 2014 adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.



Gambar 2.15 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2016 -2020

11. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Tuberkulosis

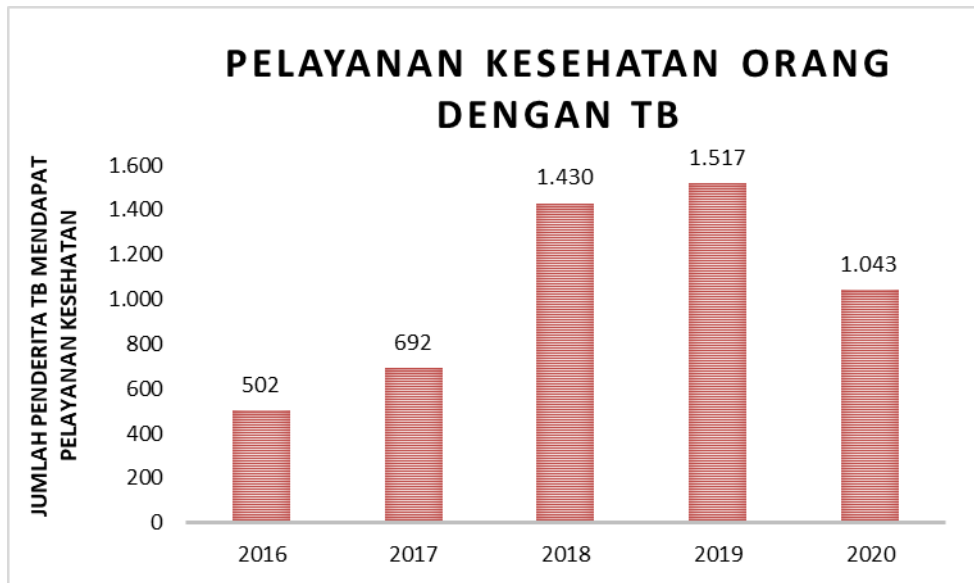
Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium Tuberculosis*. *Case Detection Rate* (CDR) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua kasus baru tuberkulosis. CDR menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang terjangkau oleh program. Pada tahun 2020 CDR 41,3 mengalami peningkatan pada tahun 2019 CDR 40,1.

CNR adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial, akan menggambarkan kecenderungan (tren) meningkat atau menurunnya penemuan kasus dari tahun ke tahun di suatu wilayah.

Capaian indikator kinerja program TB yaitu penemuan dan pengobatan kasus TB serta keberhasilan pengobatan kasus TB. Pada tahun 2020, angka penemuan dan pengobatan semua kasus terduga TB yang mendapat pelayanan sesuai standar di Kabupaten Mojokerto Indonesia sebanyak 1.045 kasus dengan *Case Detection Rate* (CDR) sebesar 41,3% dan CNR semua kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk sebesar 2.531.

Capaian indikator kinerja selanjutnya yaitu jumlah kasus TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang terdaftar dan diobati sebanyak 599 dengan angka kesembuhan TB paru terkonfirmasi bakteriologis sebanyak 603

Jumlah semua kasus tuberkulosis terdaftar dan diobati sebanyak 1.045 dimana Angka keberhasilan pengobatan lengkap semua kasus tuberkulosis sebesar 442 dan angka keberhasilan semua kasus tuberkulosis 1.045 (100%)



Gambar 2.16 Pelayanan Kesehatan Pada Penderita TB Tahun 2016 -2020

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

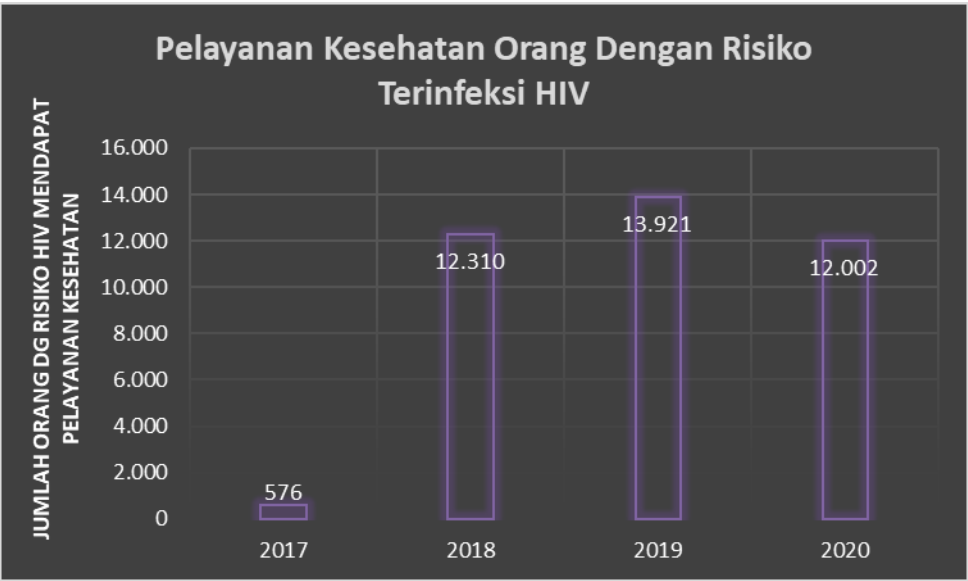
HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) yaitu sekumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV. Program pengendalian HIV di Indonesia bertujuan untuk: 1.) Menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; 2.) Menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS; 3.) Menurunkan stigma dan diskriminasi.

Secara teoritis WHO membagi tingkat epidemi HIV menjadi 3 tingkat, yaitu:

- Tingkat epidemi HIV rendah (*low level epidemic*), dimana prevalensi HIV pada kelompok risiko tinggi masih di bawah 5
- Tingkat epidemic HIV terkonsentrasi (*concentrated level epidemic*), dimana pada sub populasi tertentu (kelompok risiko tinggi) seperti kelompok Pekerja Seks Komersial (PSK), kelompok Injecting Drug Users/Use (IDU), kelompok Waria, Narapidana di Lembaga Perasyarakatan dan sebagainya, prevalensi HIV sudah lebih dari

5% secara konsisten (dalam beberapa tahun pengamatan) dan atau prevalensi HIV pada ibu hamil masih di bawah 1%.

- c. Tingkat epidemic HIV meluas (*generalized level epidemic*), dimana pada wilayah dengan tingkat epidemic HIV terkonsentrasi ditambah prevalensi HIV pada ibu hamil sudah lebih dari 1%.



Gambar 2.17 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Tahun 2016 -2020

**Tabel 2.6 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016-2020 (TC-24)**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA																	
Belanja Langsung																	
Belanja Tidak Langsung																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.176.110.800	955.426.700	898.000.000	960.733.096	703.361.091	1.115.435.233	840.520.904	808.886.759	721.492.285	666.426.801	0,95	0,88	0,90	0,75	0,95	0,60	0,60
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	470.150.000	292.500.000	282.500.000	290.000.000	302.237.500	449.705.000	273.603.900	277.029.000	244.745.857	291.537.927	0,96	0,94	0,98	0,84	0,96	0,64	0,65
Program peningkatan disiplin aparatur	556.695.000		269.618.000	353.422.000		472.871.990		187.368.800	313.970.000		0,85		0,69	0,89		0,00	0,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.000.000	15.000.000	15.000.000	17.000.000	18.905.682.686	19.766.000	15.000.000	15.000.000	13.475.000	15.167.983.012	0,66	1,00	1,00	0,79	0,80	630,19	767,38
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.450.000.000	674.339.250	457.620.000	4.732.243.000		1.450.000.000	488.986.200	433.452.768	4.574.468.100		1,00	0,73	0,95	0,97		0,00	0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	13.603.874.745	14.604.777.745	17.770.462.300	13.083.115.000		8.649.657.455	10.424.642.035	14.107.665.962	10.835.924.100		0,64	0,71	0,79	0,83		0,00	0,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan	75.000.000	75.000.000	300.000.000			74.350.000	73.500.000	294.280.000			0,99	0,98	0,98			0,00	0,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	974.973.000	580.966.000	774.338.100			640.731.650	437.415.900	589.172.500			0,66	0,75	0,76			0,00	0,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	835.000.000	796.063.750	867.850.000	2.532.196.250		817.943.150	772.013.000	860.630.000	2.501.119.915		0,98	0,97	0,99	0,99		0,00	0,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	425.000.000	155.890.000	1.140.000.000	810.000.000		425.000.000	155.390.000	928.042.500	620.970.250		1,00	1,00	0,81	0,77		0,00	0,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	25.478.168.856	2.007.815.750	4.777.610.000	3.051.376.000		1.789.363.500	1.816.238.200	4.269.613.250	2.332.482.199		0,07	0,90	0,89	0,76		0,00	0,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	305.000.000	1.677.364.000	864.000.000	1.624.000.000		246.842.940	863.378.442	664.382.963	1.101.129.239		0,81	0,51	0,77	0,68		0,00	0,00

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin				19.144.389.880					18.454.376.730					0,96			
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	51.545.575.745	17.120.072.968	61.519.088.500	22.325.374.000		48.177.197.137	16.409.900.983	56.707.426.312	20.508.938.150		0,93	0,96	0,92	0,92		0,00	0,00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		164.486.500	206.523.000	639.486.500			122.450.000	114.074.500	577.021.500			0,74	0,55	0,90		3,89	4,71
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	67.483.087.261	29.430.134.800	50.317.384.300	41.594.587.252		50.168.473.904	26.036.143.228	44.110.107.870	37.687.940.328		0,74	0,88	0,88	0,91		0,00	0,00
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan		34.374.781.370	12.879.303.456	13.364.755.555	14.341.802.783		32.428.254.785	11.725.501.010	12.346.735.567	9.796.573.349		0,94	0,91	0,92	0,68	0,42	0,30
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3.214.766.750	5.616.422.650				2.635.809.650	4.173.545.600				0,82	0,74	1,75	1,58
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan (FKTP 27 Puskesmas)		43.320.130.460	40.971.284.000	45.351.924.181			2.022.643.347	33.530.941.532	37.538.258.378			0,05	0,82	0,83		1,05	18,56
Program Kesehatan Masyarakat					32.975.004.494					30.717.663.888					0,93	0,93	0,93
Program Sumber Daya Kesehatan					21.286.674.950					20.762.384.513					0,98	0,98	0,98
Program Pelayanan Kesehatan					50.894.166.398					39.334.255.464					0,77	0,77	0,77
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (FKTP 27 Puskesmas)					39.904.933.645					35.271.814.561					0,88	0,88	0,88

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Gambaran Kinerja pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dapat diketahui dari dua hal yakni tingkat derajat kesehatan masyarakat, capaian program pelayanan kesehatan terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, pembiayaan kesehatan, sarana dan prasarana, Sumber Daya manusia (SDM) Kesehatan, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, sediaan farmasi dan manajemen pelayanan kesehatan.

a. Berdasarkan Arah Kebijakan RPJMN 2020 - 2024 :

1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
3. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
6. Pengentasan Kemiskinan
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing

Dengan Arah kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan 2020 – 2024 yakni : Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Dengan Strategi RPJMN 2020 – 2024 :

1. Peningkatan Kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. Peningkatan Pengendalian Penyakit
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
5. Penguatan Sistem Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan

b. Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan :

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care*):
 - 1). Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas
 - 2). Peningkatan SDM
 - 3). Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas
 - 4). Peningkatan Pembiayaan
 - 5). Peningkatan Sistem Informasi

2. Pelayanan Kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup , dan intervensi secara kontinyu (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
3. Penguatan pencegahan faktor resiko, deteksi dini, dan aksi mutisektoral (pembudayaan GERMAS) guna pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjdai responsif dan tangguh, guna mencapai cakupan kesehatan semesta
5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah untuk menuju korvengensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas termasuk integrasi lintas program dengan pendekatan keluarga (PIS PK)

c. Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

1. Penurunan AKI dan AKB
2. Penataan Jaminan Kesehatan Nasional (sistem rujukan)
3. Penurunan Prevalensi stunting
4. Penyakit Menular dan Tidak Menular
5. Penggerakan Taman Posyandu
6. Pemerataan tenaga kesehatan strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap Kebijakan RPJMN, Renstra Kementrian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa tantangan yang perlu ditindaklanjuti di Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Upaya penanganan Covid 19 dan Vaksinasi covid 19
2. Upaya intensif dalam penurunan AKI dan AKB
3. Upaya intensif dalam penurunan Stunting
4. Upaya dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular
5. Upaya dalam peningkatan pelayanan baik akses maupun kualitas layanan pada masyarakat
6. Selain diatas tantangan lain yakni ketersediaan jumlah, jenis dan distribusi serta kualitas tenaga

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI DINAS KESEHATAN

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Dari kondisi yang ada, maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (Tabel TC-35)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi	Kematian ibu disebabkan karena:	Faktor yang berpengaruh:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Perdarahan - Pre eklamsia - Penyakit Penyerta - Kematian saat masa nifas Kematian bayi disebabkan BBLR, Asfiksia dan penyakit kongenital - BBLR - Penyakit Kongenital - Asfiksia	-Tingkat Pengetahuan Ibu masih rendah tentang kehamilan - Masih belum optimalnya akses masyarakat ke faskes -Masih belum optimalnya pelayanan rujukan - Masih rendahnya peran serta masyarakat pada program kesehatan
2	Masih tingginya Kasus Balita Gizi Buruk dan Sunting	Balita Gizi Buruk bisa disebabkan: - Bayi lahir BBLR - Kurang energi protein dan mineral - Adanya penyakit penyerta	Faktor yang berpengaruh: - Tingkat pengetahuan yang masih rendah tentang gizi - Belum optimalnya akses pada faskes dan nakes - Masih rendahnya peran serta masyarakat
3	Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan bencana	Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular yg masih tinggi bisa disebabkan: - Cakupan Imunisasi yang belum memenuhi target Pola Hidup dan Pola Makan yang salah	Faktor yang berpengaruh: - Kurang pemahaman pentingnya imunisasi dan pengaturan pola hidup sehat (Germas) - Belum optimalnya upaya promotif dan preventif - Masih rendahnya peran serta masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat mengikuti Program Imunisasi dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
4	Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan yang bermutu	Disebabkan: Strata akreditasi Puskesmas yang mencapai paripurna hanya 1, lebih banyak pada strata madya	Faktor yang berpengaruh: - Kecukupan sarana dan prasarana puskesmas yang perlu ditingkatkan - Monitoring dan evaluasi mutu pelayanan yang belum berjalan secara optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Masih rendahnya akses dan kualitas lingkungan sehat, belum semua desa ODF	Disebabkan: Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat	Faktor yang berpengaruh: - Pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang ketersediaan sarana dan kualitas lingkungan sehat - Belum optimalnya upaya promotif dan preventif yang dilakukan, baik dalam metode, sasaran maupun pelaksanaannya
6	Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat	Disebabkan: Sulitnya mengubah perilaku masyarakat	Faktor yang berpengaruh: - Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat - Masih kurang masifnya sosialisasi/penyuluhan tentang PHBS
7	Belum tersedianya data pelayanan kesehatan berbasis elektronik	Disebabkan: Masih rendahnya pemanfaatan data elektronik	Faktor yang berpengaruh: Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Aplikasi terlalu banyak dan tidak terintegrasi
8	Belum optimalnya jenis, jumlah, pemerataan, dan kualitas SDM Kesehatan	Disebabkan: Masih terbatasnya SDM Kesehatan	Faktor yang berpengaruh: - Banyak SDM Kesehatan yang purna tugas - Adanya moratorium tidak ada rekrutmen SDM Kesehatan - Minimnya anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM Kesehatan

Sehingga bisa disimpulkan rumusan permasalahan strategis yang dihadapi saat ini oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto adalah:

1. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi
2. Masih tingginya Kasus Balita Gizi Buruk dan Sunting
3. Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular seperti pandemi covid-19, penyakit tidak menular dan bencana
4. Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan yang bermutu
5. Masih rendahnya akses dan kualitas lingkungan sehat, belum semua desa ODF
6. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat

7. Belum tersedianya data pelayanan kesehatan berbasis elektronik
8. Belum optimalnya jenis, jumlah, pemerataan, dan kalitas SDM Kesehatan

Setelah menemukan permasalahan dalam pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan, maka akan dilihat juga permasalahan atau isu-isu strategis secara luas yaitu isu internasional, nasional, regional maupun isu lainnya yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung yang akan mendorong atau menghambat dalam pelayanan. Ada isu strategis yang dijelaskan dalam yang Tabel 3.1.

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Isu Strategis		
Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/ Lokal
(1)	(2)	(3)
1. AFTA (Asean Free Trade Area)	1. Otonomi Daerah 2. Regulasi Kementerian Kesehatan belum mendukung daerah	1. Masih banyaknya tenaga kesehatan yang tidak kompeten 2. Belum meratanya tenaga kesehatan
2. SDGS (Sustainable Developments Goals)	1. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang berkembang pesat	1. Perijinan, standarisasi dan akreditasi pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan 2. Persaingan fasilitas pelayanan kesehatan
3. Universal Coverage	1. Kebijakan JKN	1. Belum semua masyarakat menjadi peserta jaminan kesehatan
4. Tobacco Control (FTCT)	1. Kebijakan Cukai dan Pajak Rokok	1. Tingginya perilaku merokok dan pola makan tidak sehat
5. Global Warming (Pemanasan Global)	1. Perubahan lingkungan menyebabkan bencana alam dan sosial	1. Kondisi lingkungan umum, lingkungan kesehatan kurang mendukung.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih

Berdasarkan Visi, Misi dan Program, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto dalam RPJMD 2021-2026, dapat dijabarkan faktor

penghambat dan pendorong sesuai dengan tupoksi Dinas Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.3.
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto

No	Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VISI				
Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia				
	Misi :			
	Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan Mojokerto Maju Mojokerto Sehat: 1. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan pelayanan Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah	Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam jumlah maupun jenis tenaga	Belum berimbangnya jumlah tenaga yang dibutuhkan dengan tenaga yang ada, adanya tenaga yang telah purna tugas belum diimbangi dengan pemenuhan tenaga Belum adanya pemetaan kompetensi dan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Terbatasnya dana untuk peningkatan kompetensi	Adanya program Perawat Ponkesdes Provinsi Jawa Timur, menambah jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Mojokerto Adanya kebijakan pembiayaan rekrutmen tenaga kesehatan dari anggaran BOK

No	Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pemenuhan Peralatan Kesehatan yang terstandar yang belum optimal	Pendataan dan monitoring ketersediaan alat kesehatan belum berjalan dengan baik	Adanya dukungan anggaran dari APBN melalui DAK, DBHCHT, DID bisa meningkatkan ketersediaan jenis dan jumlah peralatan kesehatan sehingga bisa meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang terstandar
		Pengembangan Digitalisasi Sistem Informasi Kesehatan yang masih belum optimal Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas belum mencapai strata yang ditargetkan	Belum terintegrasinya berbagai aplikasi pelaporan di Dinas Kesehatan Persiapan sarana dan prasarana kesehatan yang masih belum maksimal Membutuhkan dukungan anggaran yang besar untuk kegiatan standarisasi	Adanya aplikasi dari Kementerian Kesehatan untuk membantu pencatatan dan pelaporan. Adanya fasilitas jaringan internet yang memadai dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto sehingga mendorong pengembangan digitalisasi sistem informasi kesehatan Adanya dukungan anggaran dari APBN (DAK Non Fisik Akreditasi)

No	Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Optimalisasi Pelaksanaan PHBS	Masih rendahnya angka capaian Keluarga dengan PHBS	Belum optimalnya kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan Dinas Kesehatan dan jaringannya, baik melalui tatap muka, media massa dan elektronik	Tersedianya berbagai sarana media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan promotif dan preventif ke masyarakat
	Mojokerto Adil Mojokerto Sehat:			
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada 1000 HPK untuk mencegah stunting	Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi belum mencapai target yang ditetapkan	SDM Kesehatan belum memadai Fasilitas/Sarana prasarana belum memadai Sistem Rujukan belum optimal Pembiayaan Kesehatan masih kurang Koordinasi lintas program belum terpadu	Jumlah SDM bidan dan perawat cukup Adanya program Perawat Ponkesdes Provinsi Jawa Timur, menambah jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Mojokerto
		Prevalensi stunting yang masih tinggi	Adanya kantongkantong gizi kurang di wilayah Jawa Timur	Adanya inovasi mencegah stunting dan gizi buruk yang ada di puskesmas, dapat dikembangkan untuk menurunkan prevalensi stunting dan

No	Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				gizi buruk
			Koordinasi lintas program belum terpadu	
		Masih ada desa yang belum ODF	Belum adanya regulasi yg mengatur kesling	Adanya dukungan dari lintas sektor untuk meningkatkan akses dan fasilitas jamban di masyarakat
			Masyarakat belum menjadikan sanitasi sebagai kebutuhan	Penggunaan media tv, media cetak dan elektronik, dan sosial media untuk promosi kesling
	Mojokerto Makmur Mojokerto Sehat: Mengutamakan pencegahan penyakit dalam pemanfaatan sumber daya kesehatan	Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB), Covid-19 yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat	Perubahan lingkungan yang begitu pesat yang dapat memunculkan reemerging disease dan pandemi covid-19	Penggunaan media tv, media cetak dan elektronik, dan sosial media untuk promosi pencegahan penyakit menular dan tidak menular Adanya Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB yang bisa menjadi dasar pelaksanaan penanganan TB di Kabupaten Mojokerto

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA SKPD PROVINSI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto tidak lepas dari kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Sasaran indikator Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020- 2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- royong”

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant mortality rate) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka stunting pada balita Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (cost containment).
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Terdapat lima Tujuan pada Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 untuk mewujudkan visi, yaitu:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Disamping itu juga harus memperhatikan arah dan kebijakan RPJMN, yang terdiri dari:

d. Arah Kebijakan RPJMN 2020 – 2024, yang terdiri dari :

1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
3. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
6. Pengentasan Kemiskinan
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing

Dengan Arah kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan 2020 – 2024 yakni: Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi dan,

e. Arah Strategi RPJMN 2020 – 2024, yang terdiri dari :

1. Peningkatan Kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. Peningkatan Pengendalian Penyakit
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
5. Penguatan Sistem Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan

f. Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

1. Penurunan AKI dan AKB
2. Penataan Jaminan Kesehatan Nasional (sistem rujukan)
3. Penurunan Prevalensi stunting
4. Penyakit Menular dan Tidak Menular
5. Penggerakan Taman Posyandu
6. Pemerataan tenaga kesehatan strategis

Dilihat dari Tujuan yang ada pada Renstra Kementerian Kesehatan tersebut, sudah sejalan dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto yang mana Tujuan pada Renstra Dinas Kesehatan mendukung Tujuan Renstra Kementerian Kesehatan yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Untuk itu beberapa faktor pendorong dan penghambat yang menyebabkan permasalahan di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto terkait sasaran Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4.
 Faktor Penghambat dan Pendorong yang Menyebabkan Permasalahan
 terkait sasaran Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Renstra Kemenkes dan Dinkes Prov Jatim	1. Lemahnya sinkronisasi perencanaan penganggaran pusat dan prov terkait program dan pendanaannya 2. Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran yang sering kali tidak tepat waktu 3. Akreditasi, sertifikasi dan registrasi menjadi kewenangan pusat	1. Belum sinkronnya menu program pusat dengan prioritas 2. Belum ada standarisasi kompetensi lulusan tenaga kesehatan 3. Penerbitan e-katalog dan alat kesehatan dari LKPP tidak tepat waktu 4. Belum optimalnya implementasi perencanaan melalui e-DAK	1. Akreditasi institusi pendidikan kesehatan 2. Regulasi tentang lulusan internship dokter umum 3. UU 14/2008 dan PP 61/2010 tentang keterbukaan informasi public mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tabel 3.5.
 Faktor Penghambat dan Pendorong yang Menyebabkan
 Permasalahan Pelayanan Kesehatan Di Dinas Kesehatan terkait
 Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Hasil KLHS terkait dengan tugas dan fungsi Dinkes	Permasalahan pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	1. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk pembangunan gedung administrasi, gedung pelayanan dasar	1. Pembangunan Kesehatan belum berwawasan lingkungan	1. Lemahnya koordinasi dengan sektor terkait lingkungan	1. Sasaran renstra Kemenkes adalah pembangunan berwawasan kesehatan
	2. Peningkatan SPAL (Sarana Pembuangan Air Limbah	2. Belum adanya juknis tentang pembangunan berwawasan lingkungan	2. Kurangnya kompetensi sumber daya tenaga	2. Banyak lintas sektor yang mempunyai tupoksi terkait lingkungan
	3. Peningkatan Sarana Air Bersih dan Jamban Keluarga	3. Belum adanya kesatuan gerak dengan sektor lain dalam peningkatan lingkungan sehat		
	4. Pemantauan dan pengamatan terhadap perkembangan penyakit berbasis iklim/cuaca			
	5. Peningkatan Keluarga Sadar Gizi			
	6. Pengembangan tanaman obat			

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari hasil kajian terhadap kondisi pembangunan kesehatan di Kabupaten Mojokerto dan berbagai isu dan kebijakan kesehatan di tingkat nasional, provinsi maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Dinas Kesehatan Mojokerto. Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam

proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan kesehatan di Kabupaten Mojokerto.
- 2) Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan Kabupaten Mojokerto lainnya.
- 3) Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian target-target pembangunan Kabupaten Mojokerto di berbagai bidang.
- 4) Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi kewenangan, kebijakan dan implementasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto lima tahun mendatang adalah:

1. Penurunan AKI dan AKB yang lambat
2. Prevalensi Stunting yang masih tinggi
3. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi dengan adanya pandemi Covid-19 serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat
4. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat
5. Masih ada desa yang belum ODF
6. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam jumlah maupun jenis Tenaga

7. Pemenuhan Peralatan Kesehatan yang terstandar yang belum optimal
8. Pengembangan Digitalisasi Sistem Informasi Kesehatan yang masih belum optimal

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Adapun Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto ialah untuk mendukung Misi Nomor 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto dengan Tujuan yaitu **“Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau serta adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid-19”** dengan indikator tujuan **“Angka Harapan Hidup”**

Untuk terselenggaranya pembangunan kesehatan di Kabupaten Mojokerto secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinggi tersebut melalui:

- 1) Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan ke masyarakat dan masyarakat ke pelayanan kesehatan.
- 2) Meningkatkan akses, prasarana dan sarana, serta kualitas pelayanan kesehatan yang terstandar melalui terakreditasi paripurna fasilitas kesehatan.
- 3) Optimalisasi penanggulangan stunting dan masalah gizi
- 4) Optimalisasi upaya pengendalian penyakit menular, tidak menular dan masalah kesehatan akibat bencana serta pandemic Covid-19
- 5) Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat
- 6) Optimalisasi ketersediaan mutu manfaat dan keamanan farmasi alkes dan makanan
- 7) Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standard dan kompetensi
- 8) Meningkatkan manajemen dan sistem informasi kesehatan.

Pembangunan kesehatan yang berhasil-guna dan berdaya-guna dapat dicapai melalui pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan, serta pemantapan fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang didukung oleh sistem informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta hukum kesehatan.

Fungsi-fungsi administrasi kesehatan tersebut, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran yaitu **“Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu.”**

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto (Tabel TC-25)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau serta adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid-19	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	AHH	72,63	72,73	72,83	73,55	73,65	73,75
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Kesehatan	IKM Bidang Kesehatan	79,46	80,46	81,46	88,35	88,45	88,55
		Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP	83,97	83,99	84,01	88,00	88,50	89,00

Tabel 4.2
Cascading Dinas Kesehatan

Kepala OPD	Sasaran 1 :	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu			
	Indikator Sasaran :				
	1. AHH (Angka Harapan Hidup)				
	2. IKM				
	Program 1.02.02	Program 1.02.03	Program 1.02.04	Program 1.02.05	Program 1.02.01
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan. Dan Makanan Minuman	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sasaran Program :	Sasaran Program :	Sasaran Program :	Sasaran Program :	Sasaran Program :
	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan SDM dalam jumlah dan jenis yang sesuai standar	Meningkatnya sediaan farmasi,alat kesehatan dan makanan minuman	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	Meningkatnya pelayanan penunjang administrasi perkantoran
	Indikator Program :	Indikator Program :	Indikator Program :	Indikator Program :	Indikator Program :
	AKI	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehtan sesuai standar (minimal memiliki 7 jenis nakes)	Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	Nilai SAKIP PD
	AKB		Apotik (96 apotik)	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif	
	Persentase Stunting		Toko Obat (2 toko obat)		
	Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna		Umot (1 umot)		
	Persentase KLB yang ditangani		PIRT (1900)		

Kepala OPD	Sasaran 1 :	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu			
	Persentase ODF				
	Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat)				
	Persentase kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan : R Jalan dan R Inap				
	Persentase Indikator SPM yang mencapai target				
	Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar				
	Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar				
	Kegiatan 1.02.02. 2. 01 :	Kegiatan 1.02.03.2.01 :	Kegiatan 1.02.04.2.01 :	Kegiatan 1.02.05.2.01 :	Kegiatan 1.02.01.2.01:
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :
	Meningkatnya ketersediaan faskes yang memenuhi standar	Meningkatnya pemberian izin praktik nakes	Meningkatnya mutu kefarmasian di apotik, toko obat	Meningkatnya keg advokasi masalah kesehatan pada pemangku kebijakan dan lintas sektor	Meningkatnya perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan tepat waktu
	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :

Kepala OPD	Sasaran 1 :	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu				
	Jumlah gedung RS yg dikembangkan	Jumlah Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah (Medis dan Paramedis)	Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Usaha Mikro Obat Tradisional	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan dan Kemitraan yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlag gedung RS yang direhab/dipelihara					
	Jumlah gedung puskesmas yang direhab					
	Jumlah gedung pustu yang terpelihara dengan baik					
	Jumlah sarana prasarana fasilitas kesehatan yang terpelihara dengan baik (dinkes)					
	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
	Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin					
	Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai					
	Jumlah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
Eselon 3	Kegiatan 1.02.02. 2. 02 :	Kegiatan 1.02.03.2.02 :	Kegiatan 1.02.04.2.02 :	Kegiatan 1.02.05.2.02 :	Kegiatan 1.02.01.2.02 :	

Kepala OPD	Sasaran 1 :	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan promotif, preventif, rehabilitatif dan kuratif	Meningkatnya ketersediaan nakes sesuai standar	Meningkatnya pemantauan ijin produksi dan PKRT kelas 1		Meningkatnya ketertiban administrasi keuangan	
	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	
	1. Jumlah Puskesmas dengan cakupan K4 yang memenuhi target > 80 %	21. Jumlah Puskesmas dengan cakupan investigasi (PE/penyelidikan Epidemiologi) KLB > 80%	Jumlah Pengadaan Tenaga Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan RT yang Diterbitkan	Jumlah Kader SBH yang Dilakukan Pembinaan	
	2. Jumlah Puskesmas dengan cakupan persalinan nakes di fasyankes yang memenuhi target 100%	21. Jumlah Puskesmas yang mencapai Imunisasi Dasar lengkap sesuai target	Jumlah Pengadaan Tenaga Kesehatan sesuai Standar		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

Kepala OPD	Sasaran 1 :	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu				
	3. Jumlah Puskesmas dengan cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir yang memenuhi target 100 %	23. Jumlah masyarakat yang preminya dibayarkan pemerintah daerah yang terintegrasikan JKN				
	4. Jumlah Puskesmas dengan cakupan Pelayanan Kesehatan Balita yang memenuhi target > 90 %	24. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Intervensi Keluarga Sehat				
	5. Jumlah Puskesmas dengan cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia Pendidikan Dasar (7-15 th) yang memenuhi target 100%	25. Jumlah Puskesmas yang menyerap anggaran BOK > 90%				
	6. Jumlah Puskesmas dengan cakupan Pelayanan Kesehatan usia lanjut dengan kemandirian A memenuhi target > 70 %	26. Jumlah jaringan Puskesmas yang standar dan menerapkan strategi pergi berdana di masa senja				

Kepala OPD	Sasaran 1 :	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu				
	7. Jumlah Pelacakan kasus gizi buruk	27. Jumlah Puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar				
	8. Jumlah sasaran rentan gangguan gizi yang mendapatkan intervensi (Gizi kurang, Gizi Buruk dan Bumil KEK)	28. Jumlah kasus visum yang diajukan klaim				
	9. Jumlah penderita HIV yang mendapatkan penanganan sesuai standart	29. Jumlah Puskesmas yang menangani krisis bencana sesuai standart				
	10. Jumlah penderita HIV yang mendapatkan penanganan sesuai standart	30. Jumlah Puskesmas yang telah mengikuti rekrutasi dengan nilai paripurna				
	11. Jumlah suspek penderita TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standart	31. Jumlah puskesmas dengan nilai PKP .> 90%				

Kepala OPD	Sasaran 1 :	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu				
	12. Jumlah sasaran masyarakat usia produktif yang mendapatkan layanan skrining faktor risiko PTM	32. Jumlah Puskesmas realisasi anggaran BOK yang terserap > 90%				
	13. Jumlah Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan hipertensi (HT) standart	33. Prosentase pelaksanaan pelayanan GFK				
	14. Jumlah Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan diabetes mellitus (DM) standart	34. Prosentase pelaksanaan pelayanan Labkesda				
	15. Jumlah sasaran ODGJ berat yang mendapatkan layanan standart					
	16 Jumlah desa/kelurahan yang ODF					
	17.Prosentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas)					

Kepala OPD	Sasaran 1 :	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu				
	18. Jumlah Pos UKK yang dibentuk dan dibina					
	19. Jumlah kelompok olahraga yang dibina					
	20. Jumlah penghargaan SWASTISABA yang diterima					
	Kegiatan 1.02.02. 2. 03 :		Kegiatan 1.02.04.2.03 :	Kegiatan 1.02.05.2.03 :	Kegiatan 1.02.01.2.03 :	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Sasaran Kegiatan :		Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	
	Meningkatnya ketersediaan data berbasis elektronik		Meningkatnya tempat pengelolaan makanan/restoran dan depot air minum yang memenuhi syarat kesehatan	Meningkatnya UKBM yang naik stratanya	Meningkatnya ketertiban pencatatan dan pengamanan BMD	
	Indikator Kegiatan :		Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	
	Jumlah Ketersediaan Data Berbasis Elektronik (E-Puskesmas, Komdat, SPM Erenggar, Website Subdomain, IKM)		Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang diterbitkan	Jumlah Posyandu yang Dibina dan Naik Stratanya; Jumlah Desa Siaga yang Dibina	Jumlah Waktu Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	
	Kegiatan 1.02.02. 2. 04 :		Kegiatan 1.02.04.2.04 :		Kegiatan 1.02.01.2.04 :	

Kepala OPD	Sasaran 1 :	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu			
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Sasaran Kegiatan		Sasaran Kegiatan :		Sasaran Kegiatan :
	Meningkatnya mutu di faskes rujukan		Meningkatnya pengawasan pada sentra dan penjual makanan		Meningkatnya kinerja pegawai
	Indikator Kegiatan		Indikator Kegiatan "		Indikator Kegiatan :
	Jumlah RS yang Difasilitasi Perizinannya (RS Sumber Glagah)		Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		IP ASN Perangkat Daerah
			Kegiatan 1.02.04.2.05 :		Kegiatan 1.02.01.2.05 :
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Sasaran Kegiatan :		Sasaran Kegiatan :
			Meningkatnya kegiatan pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri RT		Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
			Indikator Kegiatan :		Indikator Kegiatan :
			Jumlah pemeriksaan post market yang dilakukan		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi

Kepala OPD	Sasaran 1 :	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu				
						Umum Perangkat Daerah
						Kegiatan 1.02.01.2.06 :
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Sasaran Kegiatan :
						Meningkatnya barang milik daerah
						Indikator Kegiatan
						Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dg mobil operasional
						Kegiatan 1.02.01.2.07 :
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Sasaran Kegiatan :
						Meningkatnya penyediaan sumber daya air dan listrik
						Indikator Kegiatan :

Kepala OPD	Sasaran 1 :	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu				
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Kegiatan 1.02.01.2.08 :
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Sasaran Kegiatan :
						Meningkatnya pemeliharaan BMD
						Indikator Kegiatan :
						Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik
						Kegiatan 1.02.01.2.09 :
						Peningkatan Pelayanan BLUD
						Sasaran Kegiatan :
						Meningkatnya layanan BLUD
						Indikator Kegiatan
						Persentase realisasi anggaran blud

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Tabel TC-26)

VISI	Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia				
MISI	Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan				
Tujuan	Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan
	Uraian	Indikator Kinerja			
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau serta adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu	1	AHH	Penguatan advokasi ke Pemda dalam penurunan AKI dan AKB dan Peningkatan Kualitas Faslitasi Kesehatan	Peningkatan Pelayanan kesehatan ibu, bayi, remaja, dan lansia
		2	IKM	Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan organisasi profesi, institusi pendidikan dan lintas sektor.	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan baik di dasar maupun di rujukan
				Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dalam penurunan AKI dan AKB	
				Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan bayi, balita dan anak	

Covid-19				Advokasi kepada Pemda terkait pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan untuk ibu dan bayi	Peningkatan Pembiayaan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam jaminan kesehatan ibu dan bayi
				Peningkatan kegiatan evaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan	
				Penguatan Advokasi ke Pemda tentang komitmen daerah dalam mendukung penanganan dan pencegahan Stunting	Penanganan masalah gizi kurang, buruk pada bayi, anak balitas, ibu hamil dan ibu menyusui
				Penguatan data dan informasi	
				Peningkatan Koordinasi Antar Stakeholder	
				Akselerasi perbaikan gizi 1000 hari Pertama Kehidupan untuk mencegah gizi buruk dan stunting	
				Sinkronisasi perencanaan pengembangan sarana, prasarana, peralatan dan tenaga pada fasilitas kesehatan	Membangun standarisasi kualitas pelayanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat
				Pembinaan dan Pengawasan Standarisasi Pelayanan	
				Membuat upaya inovatif dalam pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan dengan melibatkan akademisi dan lembaga riset kesehatan	
				Advokasi kepada Pemda terkait pembiayaan program	Membuat upaya inovatif dalam pengendalian penyakit

				kesehatan yang ada	dan penanggulangan masalah kesehatan dengan melibatkan akademisi dan lembaga riset kesehatan
		5	Persentase Desa KLB	Peningkatan kapasitas pengelola program yang ada	Advokasi kepada Pemda terkait pembiayaan program kesehatan yang ada
				Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung capaian program	Peningkatan kapasitas pengelola program yang ada
				Membuat upaya inovatif dalam pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan dengan melibatkan akademisi dan lembaga riset kesehatan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung capaian program
				Advokasi kepada Pemda terkait pembiayaan program kesehatan yang ada	
				Peningkatan kapasitas pengelola program yang ada	
				Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung capaian program	
				Menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM	Penciptaan lingkungan yang kondusif
				Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM	Peningkatan kebutuhan sanitasi

				Melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/atau desa/kelurahan	Peningkatan akses sanitasi
				Menyediakan media komunikasi, edukasi	
				Melibatkan semua potensi yang ada di masyarakat dalam forum dan pokja Kabupaten/Kota Sehat, sebagai penggerak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan	Penetapan prioritas pelaksanaan kegiatan Kab Sehat mulai dari desa, kecamatan
				Melakukan advokasi konsep Kabupaten/Kota Sehat kepada 456 penentu kebijakan.	Menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan dengan dukungan pemerintah daerah
				Mengembangkan kegiatan Kabupaten/Kota Sehat yang sesuai dengan visi dan misi dan potensi daerah dengan berbagai simbol/motto, semboyan yang dipahami dan memberikan rasa kebanggaan bagi warganya	Penetapan kawasan entri point dan pilihan tatanan
				Menjadikan suatu kota sebagai Kota kembar dari Kota Sehat di negara lain (sister city).	
				Mengembangkan informasi dan promosi yang tepat, sesuai dengan kondisi setempat baik berupa media cetak, elektronik termasuk melalui Internet. media tradisional.	

				Meningkatkan potensi ekonomi stakeholder kegiatan yang menjadi kesepakatan masyarakat.	
				Meningkatkan potensi ekonomi stakeholder kegiatan yang menjadi kesepakatan masyarakat.	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Kesehatan ditentukanlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan sebagai berikut:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material

- Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan:
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 9) Peningkatan Pelayanan BLUD
- Sub Kegiatan:
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
- Pembangunan Puskesmas
- Pengembangan Rumah Sakit
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
- Pengadaan Obat, Vaksin

- Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
- Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
- Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- Operasional Pelayanan Rumah Sakit
- Operasional Pelayanan Puskesmas
- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
- Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sub Kegiatan:

- Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
- Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
- Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Kegiatan sebagai berikut:

1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
- 2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sub Kegiatan:

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Sub Kegiatan:

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
- 3) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Sub Kegiatan:

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor

P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

- 4) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Sub Kegiatan:

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- 5) Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Sub Kegiatan:

- Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
- 6) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Sub Kegiatan:

- Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
- Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten

Sub Kegiatan:

- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif terangkum dalam Tabel 6.1 (T-C.27) berikut ini.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021-2026
(Tabel TC-27. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar Kesehatan dengan memberikan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau serta adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemic Covid-19	Terwujudnya Tsts Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai RB		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	A (83,970	83,99 (A)	131.782.046.000	84.01 (A)	158.940.647.549	84, 035 (A)	175.715.993.653	84, 070 (A)	172.784.856.000	84, 085 (A)	172.379.637.000	84, 085 (A)	811.603.180.202	Dinas Kesehatan	Kab Mojokerto
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Baik		80%	25.000.000	82%	25.000.000	84%	27.500.000	86%	25.000.000	88%	25.000.000	88%	127.500.000		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.500.000		7.500.000		10.000.000		7.500.000		7.500.000		40.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Dinkes	2 dok (Renja, Renstra)	1 dok (Renja)	7.500.000	1 dok (Renja)	7.500.000	3 dok (Renja, Renstra , perubahan renstra)	10.000.000	1 dok (Renja)	7.500.000	1 dok (Renja)	7.500.000	7 dok	40.000.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA OPD yang disusun	2 dok	2 dok	0	2 dok	0	2 dok	0	2 dok	0	2 dok	0				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA Perubaha n yang disusun	1 dok	1 dok	0	1 dok	0	1 dok	0	1 dok	0	1 dok	0				
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi penyusun an DPA	4 kali	4 kali	10.000.000	4 kali	10.000.000	4 kali	10.000.000	4 kali	10.000.000	4 kali	10.000.000	20 kali	50.000.000		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi penyusun an DPA	4 kali	4 kali	0	4 kali	0	4 kali	0	4 kali	0	4 kali	0				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah keg koordinasi penyusun an lap kinerja	6 kali	6 kali	0	6 kali	0	6 kali	0	6 kali	0	6 kali	0				
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok evaluasi yang disusun			7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		37.500.000		
					Jumlah dok lap kinerja Dinas Kesehatan (lap Renja, LKJIP, SAKIP,	7 dok	7 dok	7.500.000	7 dok	7.500.000	7 dok	7.500.000	7 dok	7.500.000	7 dok	7.500.000	35 dok	37.500.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					PMPRB, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renstra)															
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran PD	87%	88%	90.224.046.000	89%	113.777.647.549	90%	124.565.493.653	91%	116.033.856.000	92%	109.565.837.000	92%	554.166.880.202		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan			78.714.046.000		101.116.647.549		110.638.393.653		100.714.046.000		92.714.046.000				
					Dinkes	14 dok SPM	14 dok SPM	70.714.046.000	14 dok SPM	70.714.046.000	14 dok SPM	70.714.046.000	14 dok SPM	70.714.046.000	14 dok SPM	70.714.046.000	70 dok SPM	353.570.230.000		
					Insentif			8.000.000.000		30.402.601.549		39.924.347.653		30.000.000.000		22.000.000.000				
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pusk blud yg dibina, jumlah penyediaan pembiayaan bop gratis, jumlah penyediaan gaji tenaga K2	27 pusk, 12 bulan	27 pusk, 12 bulan	11.510.000.000	27 pusk, 12 bulan	12.661.000.000	27 pusk, 12 bulan	13.927.100.000	27 pusk, 12 bulan	15.319.810.000	27 pusk, 12 bulan	16.851.791.000	27 pusk, 60 bulan	70.269.701.000		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan pengamanaan BMD	12 keg	12 keg	20.000.000	12 keg	25.000.000	12 keg	30.000.000	12 keg	35.000.000	12 keg	40.000.000	60 keg	150.000.000		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kegiatan pengamanaan BMD	12 keg	12 keg	20.000.000	12 keg	25.000.000	12 keg	30.000.000	12 keg	35.000.000	12 keg	40.000.000	60 keg	150.000.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah		12 keg, 1 keg	40.000.000	12 keg, 1 keg	40.000.000	12 keg, 1 keg	40.000.000	12 keg, 1 keg	40.000.000	12 keg, 1 keg	40.000.000	60 keg, 5 keg	200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan monitoring pegawai	0	12 keg	15.000.000	12 keg	15.000.000	12 keg	15.000.000	12 keg	15.000.000	12 keg	15.000.000	60 keg	75.000.000		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan	0	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000	5 keg	125.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	87%	88%	498.000.000	89%	498.000.000	90%	498.000.000	91%	498.000.000	92%	498.000.000	92%	2.490.000.000		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi yang diadakan	1 paket	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	5 paket	25.000.000		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	1 paket	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	5 paket	125.000.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum rapat yg diadakan	1 paket	1 paket	54.000.000	1 paket	54.000.000	1 paket	54.000.000	1 paket	54.000.000	1 paket	54.000.000	5 paket	270.000.000		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang diadakan	1 paket	1 paket	38.000.000	1 paket	38.000.000	1 paket	38.000.000	1 paket	38.000.000	1 paket	38.000.000	5 paket	190.000.000		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan buku perundangan yang diadakan	1 paket	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	5 paket	15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang diadakan	1 paket	1 paket	66.000.000	1 paket	66.000.000	1 paket	66.000.000	1 paket	66.000.000	1 paket	66.000.000	5 paket	330.000.000		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang diadakan	1 paket	1 paket	7.000.000	1 paket	7.000.000	1 paket	7.000.000	1 paket	7.000.000	1 paket	7.000.000	5 paket	35.000.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi	1 paket	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	5 paket	1.000.000.000		
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah keg penatausahaan arsip yang dilaksanakan	1 paket	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	5 paket	500.000.000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dg mobil operasional	0	1 unit	400.000.000									1 unit	400.000.000		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional fogging yang diadakan		1 unit	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	400.000.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	87%	88%	275.000.000	89%	275.000.000	90%	275.000.000	91%	275.000.000	92%	275.000.000	92%	1.375.000.000		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat																

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	60 bulan	1.250.000.000		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	5 paket	125.000.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Konsisi Baik	87%	88%	300.000.000	89%	300.000.000	90%	300.000.000	91%	300.000.000	92%	300.000.000	92%	1.500.000.000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	15 unit	15 unit	100.000.000	15 unit	100.000.000	15 unit	100.000.000	15 unit	100.000.000	15 unit	100.000.000	75 unit	500.000.000		
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab	2 gedung	2 gedung	200.000.000	2 gedung	200.000.000	2 gedung	200.000.000	2 gedung	200.000.000	2 gedung	200.000.000	10 gedung	1.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD				40.000.000.000		44.000.000.000		49.980.000.000		55.578.000.000		61.635.800.000		251.193.800.000		
					Persentase Puskesmas yang realisasi anggaran BLUD terserap >	0%	90%		91%		92%		93%		94%		95%			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					90%															
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase realisasi anggaran blud			40.000.000.000		44.000.000.000		49.980.000.000		55.578.000.000		61.635.800.000		251.193.800.000		
					Dinkes	0	90%	40.000.000.000	90%	44.000.000.000	91%	49.980.000.000	92%	55.578.000.000	93%	61.635.800.000	93%	251.193.800.000		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T	AKI	115/100.000 KH (19 ibu)	114/100.000 KH	78.150.011.537	113/100.000 KH	95.866.229.000	112/100.000 KH	120.099.786.750	111/100.000 KH	124.537.211.889	110/100.000 KH	129.342.793.115	110/100.000 KH	547.996.032.290	Dinas Kesehatan	
					AKB	4,6/1.000 KH (76 bayi)	4,5/1.000 KH		4,4/1.000 KH		4,3/1.000 KH		4,2/1.000 KH		4,1/1.000 KH		4,1/1.000 KH			
					Persentase Stunting	25%	23%		21%		19%		17%		15%		15%			
					Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna	0	11,8% (5 puskesmas, 2 RS)		34% (10 Puskesmas)		51% (15 Puskesmas)		75% (20 Puskesmas, 2 RD)		100% (27 Puskesmas, 2 RD)		100% (27 Puskesmas, 2 RD)			
					Persentase KLB yang ditangani	72% (219 desa)	64% (194 desa)		56% (169 desa)		47% (144 desa)		39% (119 desa)		31% (94 desa)		31% (94 desa)			
					Persentase ODF	60%	70%		80%		90%		100%		100%		100\$			
					Penghargaan swastisaba padapa (Kabupaten Sehat)	swastisaba padapa	swastisaba padapa		swastisaba padapa		swastisaba wiwerda		swastisaba wiwerda		swastisaba wistara		swastisaba wistara			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Persentase kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan : R Jalan dan R Inap	61,5% dan 6,3%	61,5% dan 6,3%		62,5% dan 6,4%		63,5% dan 6,4%		64,5% dan 6,5%		65,5% dan 6,6%		66,5% dan 6,7%		Dinas Kesehatan	
					Persentase Indikator SPM yang mencapai target	66% (8 indikator)	75% (9 indikator)		75% (9 indikator)		84% (10indikator)		91% (11 Indikator)		100% (12 Indikator)		100% (12 Indikator)			
					Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar	90%	90%		90%		91%		92%		93%		93%			
					Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar	90%	90%		90%		91%		92%		93%		93%			
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			17.923.398.537		31.888.166.000		50.802.793.750		54.046.380.889		56.984.740.315		211.645.479.490			
					Jumlah gedung puskesmas yang direhab	2 puskesmas	4 puskesmas		5 puskesmas		5 puskesmas		6 puskesmas		7 puskesmas		27 puskesmas			
					Jumlah gedung pustu yang terpelihara dengan baik	6 gedung pustu	17 gedung pustu		12 gedung pustu		10 gedung pustu		10 gedung pustu		5 gedung pustu		55 pustu			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah sarana prasarana fasilitas kesehatan yang terpelihara dengan baik (dinkes)	24 sarana	24 sarana		25 sarana		26 sarana		26 sarana		27 sarana		27 sarana			
					Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						2 set						2 set			
					Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3 paket	14 paket		8 paket		8 paket		8 paket		8 paket		46 paket			
					Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin	1 paket	1 paket		11 paket		11 paket		11 paket		11 paket		45 paket			
					Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai	2 paket	2 paket		7 paket		7 paket		7 paket		7 paket		30 paket			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	7 paket		7 paket		7 paket		7 paket		7 paket		35 paket			
				Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	0	0	0	0	0	1 pusk	13.666.815.000	2 pusk	15.388.343.806	2 pusk	19.534.748.150				
				Pengembangan Puskesmas																
				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dipelihara	2 pusk	4 pusk	5.501.500.000	5 pusk	10.553.000.000	5 pusk	11.505.000.000	6 pusk	12.655.500.000	7 pusk	13.921.050.000	27 pusk	54.136.050.000		
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pustu yang dipelihara	6 pustu	17 pustu	2.550.000.000	13 pustu	6.500.000.000	10 pustu	6.500.000.000	10 pustu	6.500.000.000	5 pustu	3.500.000.000	55 pustu	25.550.000.000		
							Pustu Japan	150.000.000												
							Pustu Modongan	150.000.000												
							Pustu Domas	150.000.000												
							Pustu Plososari	150.000.000												
							Pustu Lengko ng	150.000.000												
							Pustu	150.000.000												

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							Mojoku mpul													
							Pustu Sumber wuluh	150.000.000												
							Pustu Simong agrok	150.000.000												
							Pustu Mirip	150.000.000												
							Pustu Canggu	150.000.000												
							Pustu Sekarga dung	150.000.000												
							Pustu Jasem	150.000.000												
							Pustu Bandar asri	150.000.000												
							Pustu Kutogir ang	150.000.000												
							Pustu Candih arjo	150.000.000												
							Pustu Wonoda di	150.000.000												
							Pustu Mojosul ur	150.000.000												
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1.650.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		150.000.000		2.700.000.000		
					Jumlah ipal yang dibangun	24 ipal	3 unit	1.350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 unit	1.350.000.000		
					Jumlah dok DPLH (UKL, UPL), SPPL (Surat	4 Dok UKL UPL	7 DPHL, 6 SPPL	300.000.000	7 DPHL, 6 SPPL	300.000.000	7 DPHL, 6 SPPL	300.000.000	3 DPHL, 6 SPPL	300.000.000	3 SPPL	150.000.000	27 DPHPL, 27 SPPL	1.350.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					pengelolaan Lingkungan)															
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alkes yang diadakan (Dinas)	1 paket	1 paket	2.530.697.537	1 paket	7.500.000.000	1 paket	10.500.000.000	1 paket	10.500.000.000	1 paket	10.500.000.000	5 paket	41.530.697.537		
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alkes di 27 puskesmas yang di kalibrasi	1 paket	1 paket	150.000.000	1 paket	160.000.000	1 paket	170.000.000	1 paket	180.000.000	1 paket	190.000.000	5 paket	850.000.000		
				Pengadaan Obat, Vaksin				3.275.701.000		4.250.701.000		4.827.951.000		4.907.518.500		5.489.473.025		22.751.344.525		
					Jumlah obat yang diadakan	1 paket	1 paket	600.000.000	1 paket	1.500.000.000	1 paket	2.000.000.000	1 paket	2.000.000.000	1 paket	2.500.000.000	5 paket	8.600.000.000		
					Jumlah obat yang diadakan	1 paket	1 paket	2.500.000.000	1 paket	2.575.000.000	1 paket	2.652.250.000	1 paket	2.731.817.500	1 paket	2.813.772.025	5 paket	13.272.839.525		
					Distribusi logistik	12 keg	12 keg	55.701.000	12 keg	55.701.000	12 keg	55.701.000	12 keg	55.701.000	12 keg	55.701.000	60 keg	278.505.000		
					Penunjang DAK	12 keg	12 keg	120.000.000	12 keg	120.000.000	12 keg	120.000.000	12 keg	120.000.000	12 keg	120.000.000	60 keg	600.000.000		
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah paket Logistik dan Bahan Habis Pakai yang diadakan Dinkes	1 paket	1 paket	1.965.500.000	1 paket	2.024.465.000	1 paket	2.733.027.750	1 paket	2.815.018.583	1 paket	2.899.469.140		12.437.480.472		
				Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan													0			
				Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung	Jumlah IPAL yang dipelihara	10 ipal	10	300.000.000	10	600.000.000	7	600.000.000	10	800.000.000	10	800.000.000	47 ipal	3.100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan kesehatan yang mencapai target	30 layanan	30 layanan	59.796.613.000	30 layanan	63.548.063.000	30 layanan	68.866.993.000	0 layanan	70.060.831.000	30 layanan	71.928.052.800	150 layanan	#REF!		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yg mendapatkan pelayanan keschatan , monitorin g evaluasi program 6 kali, orientasi pemantap an program ke nakes dan masyarakat at 3 kali, audit parinatal 4 kali, pelacakan kasus pusk dan RS 25 kali, supervisi fasilitastif 40 kali, sosialisasi KIA ke nakes 2 kali. Pembiayaa n aplikasi	18.250	18350 ibu hamil	303.000.000	18.450	333.300.000	18.550	366.630.000	18.650	403.293.000	18.750	443.622.300	92.750	1.849.845.300		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					P4K															
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil bersalin		17458 ibu bersalin	4.000.000.000	17.558	4.400.000.000	17.658	4.840.000.000	17.758	5.324.000.000	17.858	5.856.400.000	88.290	24.420.400.000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (KN) Jumlah monitoring 6 kali, orotentasi bayi 4 kali, peningkatan SDM bidan terkait neonatal 2 kali, pelacakan bayi 25 kali, sosialisasi program 3 kali untuk		16802 ibu baru lahir	200.000.000	16.902	220.000.000	17.002	242.000.000	17.102	266.200.000	17.202	292.820.000	85.010	1.221.020.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					kader dan nakes, superfisi fasilitatif 40 kali															
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan , Jumlah keg monitorin g keg balita 30 kali, orientasi program kia 2 kali, peningkatan sumber daya bidan balita 2 kali, sosialisasi program balita ke nakes 3 kali	66.652	66.652 balita	125.000.000	66.752	137.500.000	66.852	151.250.000	66.952	166.375.000	67.052	183.012.500	334.260	763.137.500		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 (workshop remaja sehat 108 remaja), penyuluhan reproduksi	38854	38900 siswa, 108 siswa	300.000.000	39.400	330.000.000	40.400	363.000.000	40.900	399.300.000	41.400	439.230.000	201.000	1.831.530.000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang diberikan pelayanan kesehatan	106061	106100 orang	50.000.000	106.600	55.000.000	107.100	60.500.000	107.600	66.550.000	108.100	73.205.000	423.301	305.255.000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan . (Lomba posyandu lansia, pendampingan keluarga resiko tinggi pada lansia)	151.994	152.000 lansia	300.000.000	152.500	330.000.000	153.000	363.000.000	153.500	399.300.000	154.000	439.230.000	765.000	1.831.530.000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	99.852	77.776 penderita	150.000.000	79.776	165.000.000	81.776	181.500.000	83.776	199.650.000	85.776	219.615.000	408.880	915.765.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yg mendapatkan layanan kesehatan	44.600	44700 penderita	150.000.000	46.700	165.000.000	48.700	181.500.000	50.700	199.650.000	52.700	219.615.000	276.576	915.765.000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penderita gangguan jiwa berat yg mendapatkan layanan kesehatan	1879	2.111 penderita	150.000.000	2.311	165.000.000	2.511	181.500.000	2.711	199.650.000	2.911	219.615.000	12.555	915.765.000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah suspek TB yang diperiksa	1043	2513 orang	300.000.000	2.713	330.000.000	2.913	363.000.000	3.113	399.300.000	3.313	439.230.000	13.565	1.831.530.000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah suspek /resiko HIV yang diperiksa	12002 orang	12002 orang	450.000.000	12.502	495.000.000	13.002	544.500.000	13.502	598.950.000	14.002	658.845.000	65.010	2.747.295.000		
					keterse diaan operasional Hibah KPA	12 bulan	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	60 bulan	1.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk an pada Kondisi KLB	0				1.000.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		5.500.000.000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Penduduk yang terdapak bencana mendapat kan pelayanan kesehatan sesuai kebutuha n	0				1.000.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		5.500.000.000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah gizi buruk yang ditangani	110 balita	100 balita	2.000.000.000	95 balita	2.200.000.000	90 balita	2.000.000.000	85 balita	2.000.000.000	80 balita	2.000.000.000	450	10.200.000.000		
					Persentase bumil KEK															
					Persentase cakupan ASI Eksklusif															
					Pertemua n Perencana an dan Evaluasi Program Gizi															
					Pertemua n Perencana an dan Evaluasi Program Peningkat an ASI Eksklusif KLA															

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Pertemuan Koordinasi Tim Stunting															
					Honorarium Tim Stunting Kabupaten															
					Peringatan Hari Gizi Nasional															
					Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak(PMBA) untuk Kader															
					Pelatihan Emo Demo untuk Kader Posyandu															
					Lomba PMT B2SA di Posyandu															
					Monev Program Gizi															
					Monev Program Peningkatan ASI Eksklusif KLA															
					Monev Tim Stunting															
					Pendampingan Ibu Menyusui															
					Pendampingan Balita Gizi Buruk															

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Pengadaan Susu Tinggi Kalori dan Protein untuk Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk															
					Pengadaan Susu Tinggi Kalori untuk Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronis)															
					Pengadaan Alat Ukur Panjang Badan															
					Pengadaan Sarana Ruang Laktasi															
					Pengadaan Leaflet															
					Foto Copy															
					Cetak Juknis Surveilans Gizi															
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah UKK, Siswa kelas 4-6 SD, orang guru OR/UKS yang dibina	22 UKK	23 UKK, 100 orang siswa SD, 30 guru UKS	65.000.000	24 UKK, 100 orang siswa SD, 30 guru UKS	70.000.000	25 UKK, 100 orang siswa SD, 30 guru UKS	75.000.000	26 UKK, 100 orang siswa SD, 30 guru UKS	80.000.000	27 UKK, 100 orang siswa SD, 30 guru UKS	85.000.000	125 UKK, 500 siswa	375.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAM (Depot Air Minum) 90 yg dilatih, pemeriksaan air minum dan air bersih 70 sampel, rumah sehat 72%, pembentukan 1 UKK	90 sampel	90 Air minum, 70 sampel air bersih, rumah sehat 72%, pembentukan pos UKK 1	900.000.000	90 Air minum, 70 sampel air bersih, rumah sehat 73%, pembentukan pos UKK 1	900.000.000	90 Air minum, 70 sampel air bersih, rumah sehat 74%, pembentukan pos UKK 1	900.000.000	90 Air minum, 70 sampel air bersih, rumah sehat 75%, pembentukan pos UKK 1	900.000.000	90 Air minum, 70 sampel air bersih, rumah sehat 76%, pembentukan pos UKK 1	900.000.000	450 sampel, 350 sampel air, 76% rumah sehat, 5 pos UKK	4.500.000.000		
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Siara Radio, Media cetak, poster, leaflet, cetak banner, media televisi dan kelompok tananan yg mendapatkan penyuluhan	12 kali siaran radio, 2.000 cetak, 6 baliho	36 kali siara radio, 12 kali media cetak, 5000 lembar poster, 5000 lembar leaflet, 2700 m persegi cetak baliho, TV 1 paket, 56 kelompok/tatanan	600.000.000	36 kali siara radio, 12 kali media cetak, 5000 lembar poster, 5000 lembar leaflet, 2700 m persegi cetak baliho, TV 1 paket, 56 kelompok/tatanan	600.000.000	36 kali siara radio, 12 kali media cetak, 5000 lembar poster, 5000 lembar leaflet, 2700 m persegi cetak baliho, TV 1 paket, 56 kelompok/tatanan	600.000.000	36 kali siara radio, 12 kali media cetak, 5000 lembar poster, 5000 lembar leaflet, 2700 m persegi cetak baliho, TV 1 paket, 56 kelompok/tatanan	600.000.000	36 kali siara radio, 12 kali media cetak, 5000 lembar poster, 5000 lembar leaflet, 2700 m persegi cetak baliho, TV 1 paket, 56 kelompok/tatanan	600.000.000	180 kali siaran, 60 kali cetak, 25000 lembar, TV 5 kali, 280 kelompok	3.000.000.000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang dibina, jumlah sosialisasi STPT ke hattra, Pengiriman petugas pelatihan	27 puskesmas	27 puskesmas, 27 orang	75.000.000	27 puskesmas, 27 orang	75.000.000	27 puskesmas, 27 orang	75.000.000	27 puskesmas, 27 orang	75.000.000	27 puskesmas, 27 orang	75.000.000	135 puskesmas, 135 orang	375.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					akupresure, Pembinaan kader asman toga 27orang,															
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah keg surveilans	240 kali	240 kali	650.000.000	240 kali	650.000.000	240 kali	650.000.000	240 kali	650.000.000	240 kali	650.000.000	1200	3.250.000.000		
					Kegiatan pemeriksaan haji	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			0		
					Surveilans tata kelola rantai dingin	104 kali	104 kali		104 kali		104 kali		104 kali		104 kali					
					Surveilans suhu vaksin	304 kali	304 kali		304 kali		304 kali		304 kali		304 kali					
					Pemantauan rantai dingin	81 kali	81 kali		81 kali		81 kali		81 kali		81 kali					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah pelayanan kesehatan dg mslh kesehatan jiwa	5200 orang	5200 orang	50.000.000	5200 orang	50.000.000	5200 orang	50.000.000	5200 orang	50.000.000	5200 orang	50.000.000	26000	250.000.000		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah sekolah dan pondok yg mendapatkan sosialisasi kesehatan jiwa dan napza	0	54 sekolah, 10 pondok	50.000.000	54 sekolah, 10 pondok	50.000.000	54 sekolah, 10 pondok	50.000.000	54 sekolah, 10 pondok	50.000.000	54 sekolah, 10 pondok	50.000.000	270, 10 pondok	250.000.000		
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah yang mendapatkan layanan kesehatan khusus	0														

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Pengelolaan penanganan krisis kesehatan	0														
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fogging Fokus DBD	198 fokus	250 fokus	400.000.000	260 fokus	400.000.000	250 fokus	400.000.000	250 fokus	400.000.000	250 fokus	400.000.000	1250 fokus	2.000.000.000		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah PBID yang dibiayai, visum	24.467, 103 pasien	43143, 103 pasien	19.000.000.000	43143, 103 pasien	19.098.650.000	43143, 103 pasien	22.000.000.000	43143, 103 pasien	24.000.000.000	43143, 103 pasien	25.000.000.000	215.715, 115 pasien	109.098.650.000		
				Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah sekolah dan pondok yg mendapatkan sosialisasi kesehatan jiwa dan napza	20 sekolah	54 sekolah, 10 pondok	50.000.000	54 sekolah, 10 pondok	50.000.000	54 sekolah, 10 pondok	50.000.000	54 sekolah, 10 pondok	50.000.000	54 sekolah, 10 pondok	50.000.000	270 sekolah, 10 pondok	250.000.000		
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Kegiatan pengiriman sampel	120 kali	240 kali	120.000.000	240 kali	120.000.000	240 kali	120.000.000	240 kali	120.000.000	240 kali	120.000.000	1200	600.000.000		
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Mewujudkan 5 tatanan, 4 wajib 1 pilihan	swastisaba padapa	swastisaba padapa	290.000.000	swastisaba padapa	290.000.000	swastisaba wiwerda	290.000.000	swastisaba wiwerda	295.000.000	swastisaba wistara	295.000.000	swastisaba wistara	1.460.000.000		
				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan																

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Kesehatan																
				Pengelolaan Penelitian Kesehatan																
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit																
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah pasien yang mendapat bantuan makmin pasien sebanyak 56.000	55.000 pasien	56.000 pasien	1.080.000.000	56.000 pasien	1.080.000.000	56.000 pasien	1.080.000.000	56.000 pasien	1.080.000.000	56.000 pasien	1.080.000.000	280000	5.400.000.000		
					BOK Pusk	27 puskesmas		20.478.613.000	27 puskesmas	20.478.613.000	27 puskesmas	20.478.613.000	27 puskesmas	20.478.613.000	27 puskesmas	20.478.613.000	135 puskesmas	102.393.065.000		
					BOK Dinkes	12 bulan		1.200.000.000	12 bulan	1.200.000.000	12 bulan	1.200.000.000	12 bulan	1.200.000.000	12 bulan	1.200.000.000	60 bulan	6.000.000.000		
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah alat di labkesda yang dipelihara, jumlah kesediaan anggaran untuk operasional labkesda	1 paket, 12 bulan	1 paket, 12 bulan	1.000.000.000	1 paket, 12 bulan	1.000.000.000	1 paket, 12 bulan	1.000.000.000	1 paket, 12 bulan	1.000.000.000	1 paket, 12 bulan	1.000.000.000	5 paket, 60 bulan	5.000.000.000		
					Jumlah ketersediaan biaya operasional PMI, pembayaran utang reagen, pembelian reagen, operasional PMI	12 bulan	12 bulan	1.350.000.000	12 bulan	1.350.000.000	12 bulan	1.350.000.000	12 bulan	1.350.000.000	12 bulan	1.350.000.000	60 bulan	6.750.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah penilaian Puskesmas (PKP), keg PAM Lebaran, jumlah puskesmas yg re akreditasi, pembinaan klinik	27 puskesmas PKP, 2 Puskesmas lebaran, 27 akreditasi, 1 puskesmas, 1 klinik	27 puskesmas PKP, 2 Puskesmas lebaran, 6 re akreditasi, 1 klinik	500.000.000	27 puskesmas PKP, 2 Puskesmas lebaran, 10 klinik	700.000.000	27 puskesmas PKP, 2 Puskesmas lebaran, 20 re akreditasi, 10 klinik	600.000.000	27 puskesmas PKP, 2 Puskesmas lebaran, 6 re akreditasi, 10 klinik	500.000.000	27 puskesmas PKP, 2 Puskesmas lebaran, 10 klinik	500.000.000	135 puskesmas, 10 Puskesmas, 50 klinik	2.800.000.000		
						27 puskesmas akreditasi, 1 re akreditasi	Akreditasi (DAK) 6 puskesmas re akreditasi	1.160.000.000		1.160.000.000		1.160.000.000		1.160.000.000		1.160.000.000		5.800.000.000		
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah imunisasi dasar lengkap	17.557 bayi IDL	17.557	700.000.000	17.757	700.000.000	17.957	700.000.000	18.157	700.000.000	18.357	700.000.000	89.785	3.500.000.000		
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah keg kewaspadaan dini dan respon wabah	12 keg	12 keg	500.000.000	12 keg	500.000.000	12 keg	1.500.000.000	12 keg	500.000.000	12 keg	500.000.000	60 keg	3.500.000.000		
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Peningkatan Sarana dan Prasarana sistem penanganan Gawat darurat	0	1 paket	900.000.000	1 paket	1.500.000.000	1 paket	1.500.000.000	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.000.000.000	5 paket	5.900.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah ketersediaan data berbasis elektronik	5 data dan 4 portal (Epuskesmas, Komdat, SPM erenggar, website subdom ain, IKM)	5 data dan 4 portal (Epuskesmas, Komdat, SPM erenggar, website subdom ain, IKM)	180.000.000	5 data dan 4 portal (Epuskesmas, Komdat, SPM erenggar, website subdom ain, IKM)	180.000.000	5 data dan 4 portal (Epuskesmas, Komdat, SPM erenggar, website subdom ain, IKM)	180.000.000	5 data dan 4 portal (Epuskesmas, Komdat, SPM erenggar, website subdom ain, IKM)	180.000.000	5 data dan 4 portal (Epuskesmas, Komdat, SPM erenggar, website subdom ain, IKM)	180.000.000	20 data dan 16 portal (Epuskesmas, Komdat, SPM erenggar, website subdom ain, IKM)	900.000.000		
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Data dan informasi yang dikelola	5 data dan informasi (SPM, SDG's, IPKM, IPM, profil kesehatan)	5 data dan informasi (SPM, SDG's, IPKM, IPM, profil kesehatan)	75.000.000	5 data dan informasi (SPM, SDG's, IPKM, IPM, profil kesehatan)	75.000.000	5 data dan informasi (SPM, SDG's, IPKM, IPM, profil kesehatan)	75.000.000	5 data dan informasi (SPM, SDG's, IPKM, IPM, profil kesehatan)	75.000.000	5 data dan informasi (SPM, SDG's, IPKM, IPM, profil kesehatan)	75.000.000				
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah portal sistem informasi yang harus dikelola	4 portal (epusk, web, komdat, siscobike)	4 portal (epusk, web, komdat, siscobike)	105.000.000	4 portal (epusk, web, komdat, siscobike)	105.000.000	4 portal (epusk, web, komdat, siscobike)	105.000.000	4 portal (epusk, web, komdat, siscobike)	105.000.000	4 portal (epusk, web, komdat, siscobike)	105.000.000				
				Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah pengadaan alat/perangkat SIK dan jaringan internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah RS yang difasilitasi perijinannya	1 RS (RS Sumber Glagah)	3 RS (RS Islam Arofah, RS Dharma Husada, RS Islam Sakinah)	250.000.000	250.000.000	2 RS (RS RA Basoeni, RS Mawadah Medika, RS Soekandardar, RS Mutiara Hati, RS Kartini, RS Dian Husada)	250.000.000	1 RS (RS Sidowaras)	250.000.000	4 RS (RS Soekandardar, RS Mutiara Hati, RS Kartini, RS Dian Husada)	250.000.000	11 RS	1.250.000.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pengendalian Izin Operasional 11 Rumah Sakit	11 RS	1 RS (RS Sumber Glagah)	50.000.000	3 RS (RS Islam Arofah, RS Dharma Husada, RS Islam Sakinah)	50.000.000	2 RS (RS RA Basoeni, RS Mawadah Medika,	50.000.000	1 RS (RS Sidowaras)	50.000.000	4 RS (RS Soekandard, RS Mutiara Hati, RS Kartini, RS Dian Husada)	50.000.000	11 RS	250.000.000		
				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tatakelola 11 pelayanan Rumah Sakit sesuai standar kemenkes	11 RS	11 RS	50.000.000	11 RS	50.000.000	11 RS	50.000.000	11 RS	50.000.000	11 RS	50.000.000	55 RS	250.000.000		
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Mutu pelayanan di 11 Rumah Sakit sesuai standar Kemenkes	11 RS	11 RS	100.000.000	11 RS	100.000.000	11 RS	100.000.000	11 RS	100.000.000	11 RS	100.000.000	55 RS	500.000.000		
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	adanya Dokumen perumusan pelayanan Kesehatan Rujukan	2 dok	2 dok	50.000.000	2 dok	50.000.000	2 dok	50.000.000	2 dok	50.000.000	2 dok	50.000.000	10 dok	250.000.000		
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	70%	75%	3.050.000.000	80%	3.050.000.000	85%	3.050.000.000	90%	3.050.000.000	90%	3.050.000.000	90%	15.250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah (Medis dan Paramedis)	1150	1175	150.000.000	1200	150.000.000	1225	150.000.000	1250	150.000.000	1275	150.000.000	6125	750.000.000		
				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																
				Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah nakes yg dibina dan diterbitkan surat ijinnya	1150	1175	150.000.000	1200	150.000.000	1225	150.000.000	1250	150.000.000	1275	150.000.000	6125	750.000.000		
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaaan tenaga kesehatan sesuai standar yang ada	33,211,2	33,211,2	2.900.000.000	33,211,2	2.900.000.000	33,211,2	2.900.000.000	33,211,2	2.900.000.000	33,211,2	2.900.000.000	165 nakes,1055 perawat, 10 dokter	14.500.000.000		
				Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah nakes yg direkrut	33	33	900.000.000	33	900.000.000	33	900.000.000	33	900.000.000	33	900.000.000	165 nakes	4.500.000.000		
					Jumlah perawat ponkesdes yang direkrut 211 dan jumlah dokter yg direkrut 2 orang	211, 2	211,2	2.000.000.000	211,2	2.000.000.000	211,2	2.000.000.000	211,2	2.000.000.000	211,2	2.000.000.000	1055 perawat, 10 dojter	10.000.000.000		
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Mutu dan kompetensi si SDMK															
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan			550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		580.000.000		2.780.000.000		
					Apotik (96 apotik)	15%	30%		45%		60%		75%		100%		100%			
					Toko Obat (2 toko obat)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
					Umot (1 umot)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
					PIRT (1900)	1300 (68%)	1420 (74%)		1540 (81%)		1660(87%)		1780 (93%)		1900(100%)		1900 (100%)			
					Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaa n Rumah Tangga, perbekala n kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/sta ndar kesehatan	20%	20%		20%		20%		20%		20%		100%			
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	jumlah pemberian ijinapotek , toko obat, toko alkes dan usaha mikro obat tradisional	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	130.000.000	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	130.000.000	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	130.000.000	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	130.000.000	21 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	160.000.000	81 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 600 PIRT	680.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotik, toko obat, yg diawasi 20	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	50.000.000	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	50.000.000	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	50.000.000	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	50.000.000	21Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	60.000.000	81 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 600 PIRT	260.000.000		
				Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah data perijinan yang disediakan 20 apotik	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	40.000.000	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	40.000.000	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	40.000.000	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	40.000.000	21Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	50.000.000	81 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 600 PIRT	210.000.000		
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah pembinaan apotik	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	40.000.000	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	40.000.000	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	40.000.000	15 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	40.000.000	21Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 120 PIRT	50.000.000	81 Apotik, 1 toko obat, 1 umot, 600 PIRT	210.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sertifikat produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1	3	3	55.000.000	3	55.000.000	3	55.000.000	3	55.000.000	3	55.000.000	15	275.000.000		
				Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	0															
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah pengendalian dan pengawasan	3 PKRT	3 PKRT	55.000.000	3 PKRT	55.000.000	3 PKRT	55.000.000	3 PKRT	55.000.000	3 PKRT	55.000.000	15 PKRT	275.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat produksi pangan RT yang diterbitkan	120	120	175.000.000	120	175.000.000	120	175.000.000	120	175.000.000	120	175.000.000	600	875.000.000		
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat yg dikeluarkan	120	120	175.000.000	120	175.000.000	120	175.000.000	120	175.000.000	120	175.000.000	600	875.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang diterbitkan	70 sertifikat	70 sertifikat	60.000.000	70 sertifikat	60.000.000	70 sertifikat	60.000.000	70 sertifikat	60.000.000	70 sertifikat	60.000.000	350 sertifikat	300.000.000		
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah jasa boga yang diawasi	70 jasa boga	70 jasa boga	60.000.000	70 jasa boga	60.000.000	70 jasa boga	60.000.000	70 jasa boga	60.000.000	70 jasa boga	60.000.000	350	300.000.000		
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	20	20 sekolah	50.000.000	20 sekolah	50.000.000	20 sekolah	50.000.000	20 sekolah	50.000.000	20 sekolah	50.000.000	100 sekolah	250.000.000		
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan																

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																
				Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah yang diawasi 20 sekolah	20	20 sekolah	50.000.000	20 sekolah	50.000.000	20 sekolah	50.000.000	20 sekolah	50.000.000	20 sekolah	50.000.000	100 sekolah	250.000.000		
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah pemeriksaan post market yang dilakukan	120 kali	120 kali	80.000.000	120 kali	80.000.000	120 kali	80.000.000	120 kali	80.000.000	120 kali	80.000.000	600	400.000.000		
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah pemeriksaan post market 120	120 kali	120 kali	40.000.000	120 kali	40.000.000	120 kali	40.000.000	120 kali	40.000.000	120 kali	40.000.000	600	200.000.000		
				Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut	Jumlah pengawasan 120	120 kali	120 kali	40.000.000	120 kali	40.000.000	120 kali	40.000.000	120 kali	40.000.000	120 kali	40.000.000	600	200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga																
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	72	72	850.000.000	73	850.000.000	74	850.000.000	75	850.000.000	76	850.000.000	76	4.250.000.000		
					Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yang aktif	80,9	81,9		82,9		83,9		84,9		85,9		85,9			
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, pemberdayaan dan kemitraan yang dilaksanakan	Giat Promosi mslh kesehatan, giat peringatan hari kesehatan nasional, Konseling, pendampingan bumilristi, pendampingan poskestresn dana BK	5 keg	250.000.000	5 keg	250.000.000	5 keg	250.000.000	5 keg	250.000.000	5 keg	250.000.000	30 keg	1.250.000.000		
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	Jumlah kegiatan kampanye, gebyar peringatan Hari Kesehatan		1 keg	250.000.000	1 keg	250.000.000	1 keg	250.000.000	1 keg	250.000.000	1 keg	250.000.000	5 Keg	1.250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pemberdayaa n Masyarakat	Nasional															
					Pelayanan Kesehatan Promotif/ Preventif Melalui Sosialisasi dan Publikasi Masalah Kesehatan (DBHCHT)		0													
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kader SBH yang dilakukan pembinaan	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000	25 sekolah, 25 ponpes, 1350 kader SBH, 90 posyandu, 25 desa	1.000.000.000		
				Penyelenggar aan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah sekolah, pondok pesantren, SBH, posyandu, dan desa siaga	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000	5 sekolah, 5 ponpes, 270 kader SBH, 18 posyandu, 5 desa	200.000.000	25 sekolah, 25 ponpes, 1350 kader SBH, 90 posyandu, 25 desa	1.000.000.000		
				Pengembanga n dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu yang dibina dan naik stratanya	6 posyandu	6 posyandu	400.000.000	6 posyandu	400.000.000	6 posyandu	400.000.000	6 posyandu	400.000.000	6 posyandu	400.000.000	30 posyandu	2.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Jumlah Desa Siaga yang dibina	6 desa siaga	6 desa siaga		6 desa siaga		6 desa siaga		6 desa siaga		6 desa siaga		30 desa siaga	0		
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM yang naik stratanya Posyandu, desa siaga, SBH	6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas	6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas	400.000.000	6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas	400.000.000	6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas	400.000.000	6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas	400.000.000	6 posyandu, 6 desa, 6 puskesmas	400.000.000	30 posyandu, 30 desa, 30puskesmas	2.000.000.000		
								214.382.057.537		259.256.876.549		300.265.780.403		301.772.067.889		306.202.430.115		1.381.879.212.492		

BAB VII
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2024 yang mengacu pada RPJMD, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (TC-28)

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kesehatan (AHH)	72.63	72,73	72,83	73,55	73,65	73,75	73,75
2	IKM	79,46	80,46	81,46	88,35	88,45	88,55	88,55
2	AKI	115/100.00 0 KH (19 ibu)	114	113	112	111	110	110
3	AKB	4,6/1.000 KH (76 bayi)	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	4,1
4	Persentase Stunting	25%	23%	21%	19%	17%	15%	15%
5	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	4% (1 Puskesmas)	18% (5 Puskesmas)	37% (10 Puskesmas)	55% (15 Puskesmas)	74% (20 Puskesmas)	100% (27 Puskesmas)	100%
6	Persentase Desa KLB	72% (219 desa)	64% (194 desa)	56% (169 desa)	47% (144 desa)	39% (119 desa)	31% (94 desa)	94
7	Persentase ODF (desa ODF)	30,5%	60,5%	70,5%	80,5%	90,5%	100%	100%
8	Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat)	swastisaba padapa	swastisaba padapa	swastisaba padapa	swastisaba wiwerda	swastisaba wiwerda	swastisaba wistara	swastisaba wistara
9	Persentase kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan : R Jalan dan R Inap	61,5% dan 6,3%	61,5% dan 6,3%	62,5% dan 6,4%	63,5% dan 6,4%	64,5% dan 6,5%	65,5% dan 6,6%	65,5% dan 6,6%
10	Persentase Indikator SPM yang mencapai target	66% (8 indikator)	75% (9 indikator)	75% (9 indikator)	84% (10 indikator)	91% (11 Indikator)	100% (12 Indikator)	100% (12 Indikator)
11	Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar	90	90	90	91	92	93	93

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar	90	90	90	91	92	93	93
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	A	A	A	A	A	A
14	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	70%	75%	80%	85%	90%	90%	90%
15	Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan							
	- Apotik (96 apotik)	15%	30%	45%	60%	75%	100%	100%
	- Toko Obat (2 toko obat)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Umot (1 umot)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- PIRT (1900)	1300 (68%)	1420 (74%)	1540 (81%)	1660(87 %)	1780 (93%)	1900(100%)	1900(100%)
16	Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	71%	72%	73%	74%	75%	76%	76%
18	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif	80,90%	81,90%	82,90%	83,90%	84,90%	85,90%	85,90%
19	Nilai RB	83,97	83,99	84,01	84,035	84,070	84,085	84,085
20	Nilai Sakip	83,97	83,99	84,01	88,00	88,50	89,00	89,00

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Strategi, Sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan kesehatan di Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu 5 tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto di bidang kesehatan, yang akan menjadi arahan bersama bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto

Dikemudian hari apabila terjadi perubahan-perubahan yang mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan, maka rencana strategis yang telah disusun sangat dimungkinkan untuk mendapatkan penyesuaian

Tentunya rencana strategis ini hanya akan sangat bermanfaat bila semua pelaku pembangunan kesehatan bekerja penuh dedikasi dan berorientasi pada tujuan akhir pembangunan dan dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi kesehatan.



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KESEHATAN

Jalan Raya R. A Basuni No. 4 Mojokerto, Kode pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 321957 Fax. (0321) 390113
Website : <http://mojokertokab.go.id/mjk/sub/dinkes>
Email : dinkeskabmojokerto@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/6627/416-102.E/2024
TENTANG
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2016;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2016.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 9);
 14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

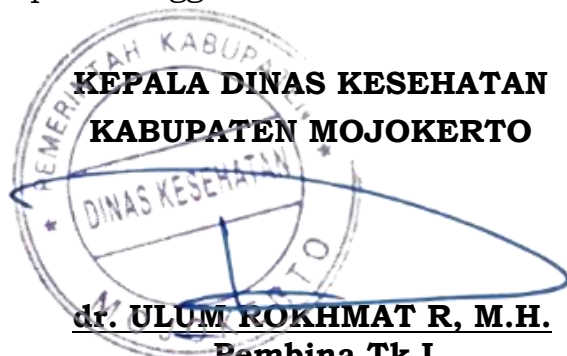
Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dimuat pada Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto (Setelah Perubahan) dan Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Setelah Perubahan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 26 Juni 2024


**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

dr. ULUM ROKHMAT R, M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19741113 200604 1 008

LAMPIRAN

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto (Tabel TC-25)
(Sebelum Perubahan)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau serta adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid-19	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai RB	83,97	83,99	84,01	84,035	84,070	84,085
		Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu	AHH	72,63	72,73	72,83	72,93	73,03	73,12
			IKM Bidang Kesehatan	79,46	80,46	81,46	82,46	83,46	84,46

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
(Setelah Perubahan)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau serta adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid-19	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	AHH	72,63	72,73	72,83	73,55	73,65	73,75
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Kesehatan	IKM Bidang Kesehatan	79,46	80,46	81,46	88,35	88,45	88,55
		Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP	83,97	83,99	84,01	88,00	88,50	89,00

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (TC-28)

(Sebelum Perubahan)

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kesehatan (AHH)	72.63	72,73	72,83	72,93	73,03	73,13	73,13
2	IKM	79,46	79,46	80,46	81,46	82,46	83,46	84,46
2	AKI	115/100.00 KH (19 ibu)	114	113	112	111	110	110
3	AKB	4,6/1.000 KH (76 bayi)	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	4,1
4	Persentase Stunting	25%	23%	21%	19%	17%	15%	15%
5	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	4% (1 Puskesmas)	18% (5 Puskesmas)	37% (10 Puskesmas)	55% (15 Puskesmas)	74% (20 Puskesmas)	100% (27 Puskesmas)	100%
6	Persentase Desa KLB	72% (219 desa)	64% (194 desa)	56% (169 desa)	47% (144 desa)	39% (119 desa)	31% (94 desa)	94
7	Persentase ODF (desa ODF)	30,5%	60,5%	70,5%	80,5%	90,5%	100%	100%
8	Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat)	swastisaba padapa	swastisaba padapa	swastisaba padapa	swastisaba wiwerda	swastisaba wiwerda	swastisaba wistara	swastisaba wistara
9	Persentase kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan : R Jalan dan R Inap	61,5% dan 6,3%	61,5% dan 6,3%	62,5% dan 6,4%	63,5% dan 6,4%	64,5% dan 6,5%	65,5% dan 6,6%	65,5% dan 6,6%

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	Persentase Indikator SPM yang mencapai target	66% (8 indikator)	75% (9 indikator)	75% (9 indikator)	84% (10 indikator)	91% (11 Indikator)	100% (12 Indikator)	100% (12 Indikator)
11	Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar	90	90	90	91	92	93	93
12	Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar	90	90	90	91	92	93	93
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	A	A	A	A	A	A
14	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	70%	75%	80%	85%	90%	90%	90%
15	Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan							
	- Apotik (96 apotik)	15%	30%	45%	60%	75%	100%	100%

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- Toko Obat (2 toko obat)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Umot (1 umot)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- PIRT (1900)	1300 (68%)	1420 (74%)	1540 (81%)	1660(87%)	1780 (93%)	1900(100%)	1900(100%)
16	Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
17	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	71%	72%	73%	74%	75%	76%	76%
18	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif	80,90%	81,90%	82,90%	83,90%	84,90%	85,90%	85,90%
19	Nilai RB	83,97	83,99	84,01	84,035	84,070	84,085	84,085
20	Nilai Sakip	83,97	83,99	84,01	84,035	84,070	84,085	84,085

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (TC-28)
(Setelah Perubahan)

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kesehatan (AHH)	72.63	72,73	72,83	73,55	73,65	73,75	73,75
2	IKM	79,46	80,46	81,46	88,35	88,45	88,55	88,55
2	AKI	115/100.000 KH (19 ibu)	114	113	112	111	110	110
3	AKB	4,6/1.000 KH (76 bayi)	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	4,1
4	Persentase Stunting	25%	23%	21%	19%	17%	15%	15%
5	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	4% (1 Puskesmas)	18% (5 Puskesmas)	37% (10 Puskesmas)	55% (15 Puskesmas)	74% (20 Puskesmas)	100% (27 Puskesmas)	100%
6	Persentase Desa KLB	72% (219 desa)	64% (194 desa)	56% (169 desa)	47% (144 desa)	39% (119 desa)	31% (94 desa)	94
7	Persentase ODF (desa ODF)	30,5%	60,5%	70,5%	80,5%	90,5%	100%	100%
8	Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat)	swastisaba padapa	swastisaba padapa	swastisaba padapa	swastisaba wiwerda	swastisaba wiwerda	swastisaba wistara	swastisaba wistara
9	Persentase kunjungan masyarakat ke	61,5% dan 6,3%	61,5% dan 6,3%	62,5% dan 6,4%	63,5% dan 6,4%	64,5% dan 6,5%	65,5% dan 6,6%	65,5% dan 6,6%

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	fasilitas kesehatan : R Jalan dan R Inap							
10	Persentase Indikator SPM yang mencapai target	66% (8 indikator)	75% (9 indikator)	75% (9 indikator)	84% (10 indikator)	91% (11 Indikator)	100% (12 Indikator)	100% (12 Indikator)
11	Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar	90	90	90	91	92	93	93
12	Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar	90	90	90	91	92	93	93
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	A	A	A	A	A	A
14	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	70%	75%	80%	85%	90%	90%	90%
15	Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi							

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	standar kesehatan							
	- Apotik (96 apotik)	15%	30%	45%	60%	75%	100%	100%
	- Toko Obat (2 toko obat)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Umot (1 umot)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- PIRT (1900)	1300 (68%)	1420 (74%)	1540 (81%)	1660(87%)	1780 (93%)	1900(100%)	1900(100%)
16	Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
17	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	71%	72%	73%	74%	75%	76%	76%

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif	80,90%	81,90%	82,90%	83,90%	84,90%	85,90%	85,90%
19	Nilai RB	83,97	83,99	84,01	84,035	84,070	84,085	84,085
20	Nilai Sakip	83,97	83,99	84,01	88,00	88,50	89,00	89,00